



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENATAAN TATA LAKSANA (*BUSINESS PROCESS*)
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan akuntabel yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka diperlukan penataan tata laksana (*business process*) yang memuat seluruh proses sesuai dengan tugas dan fungsi struktur organisasi yang ada di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
 - b. bahwa saat ini Badan Narkotika Nasional belum mempunyai dokumen penataan tata laksana (*business process*), guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sehingga perlu diatur mengenai penataan tata laksana (*business process*) yang ada di lingkungan Badan Narkotika Nasional;

- c. bahwa bahwa saat ini Badan Narkotika Nasional belum mengatur tentang penataan tata laksana (*business process*), sehingga perlu diatur mengenai pengaturan tentang penataan tata laksana (*business process*) yang ada di lingkungan Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata laksana (*Business Process*);
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENATAAN TATA LAKSANA (*BUSINESS PROCESS*) DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

2. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.
3. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BNNK/Kota adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.
4. Proses Bisnis (*Business Process*) atau Tata Laksana yang selanjutnya disebut Proses Bisnis adalah sekumpulan aktifitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna.
5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang mengidentifikasi secara jelas langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu Proses Bisnis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman bagi Pegawai dan unit kerja yang ada di BNN, BNNP dan BNNK/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Kepala Badan ini adalah:

- a. menciptakan tertib penyelenggaraan tugas dan fungsi setiap unit kerja BNN, BNNP dan BNNK/Kota;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
- c. mendorong setiap unit kerja BNN, BNNP dan BNNK/Kota untuk melaksanakan Proses Bisnis pada setiap tugas dan fungsi; dan
- d. memberikan pelayanan prima kepada pengguna layanan maupun para pemangku kepentingan.

BAB III PROSES BISNIS

Pasal 4

Proses Bisnis dibuat dan disusun sesuai dengan bidang tugas dan fungsi struktur organisasi yang ada di BNN, BNNP dan BNNK/Kota dalam rangka melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 5

- (1) Proses Bisnis yang ada di BNN, BNNP dan BNNK/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dalam bentuk Peta Proses Bisnis.
- (2) Peta Proses Bisnis disusun oleh Sekretariat Utama melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 6

Peta Proses Bisnis digunakan sebagai dasar:

- a. penataan organisasi;
- b. penyusunan dan perbaikan uraian jabatan; dan
- c. kewenangan jabatan dalam menentukan Proses Bisnis.

Pasal 7

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

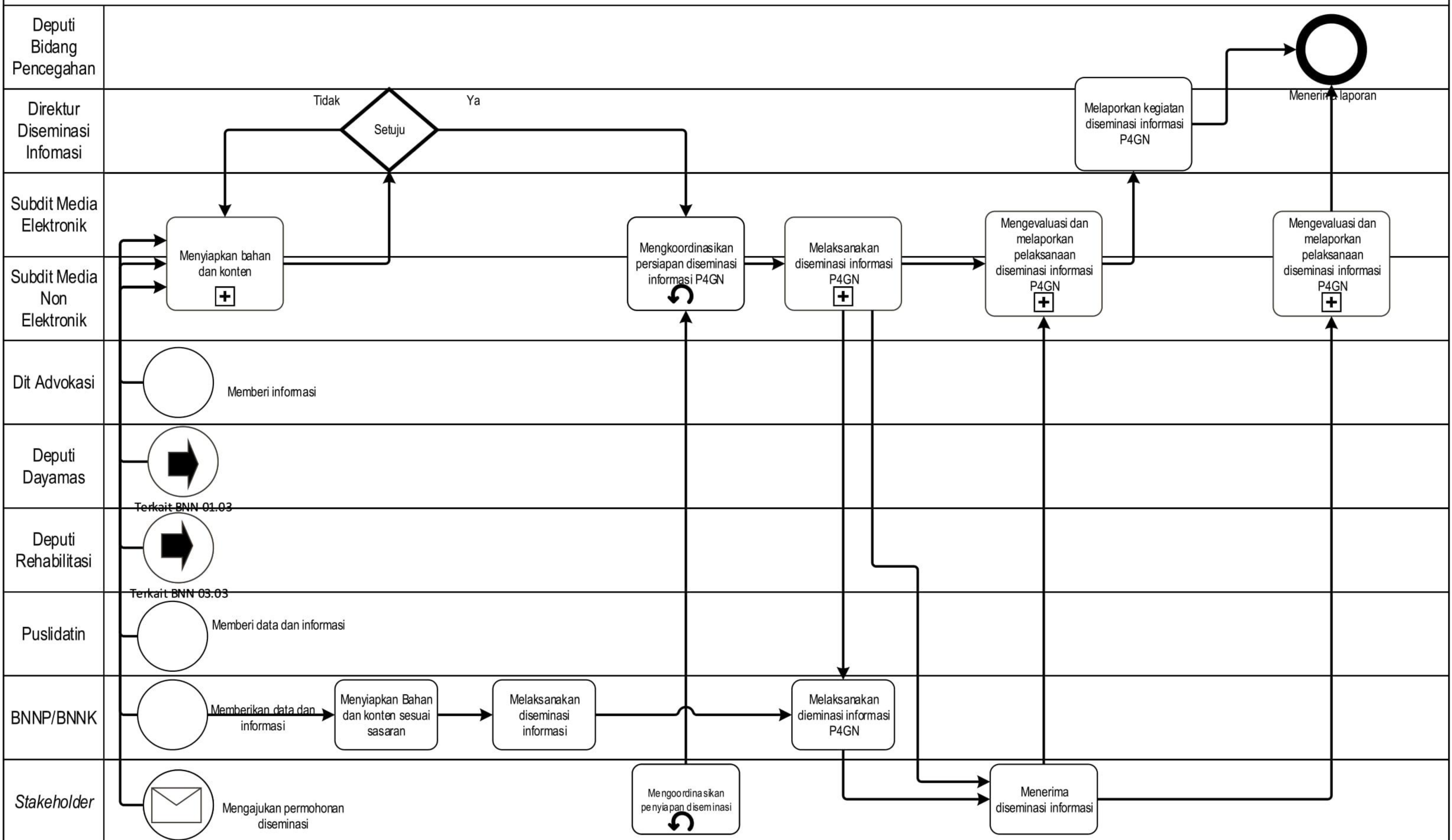
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2018
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
BUDI WASESO

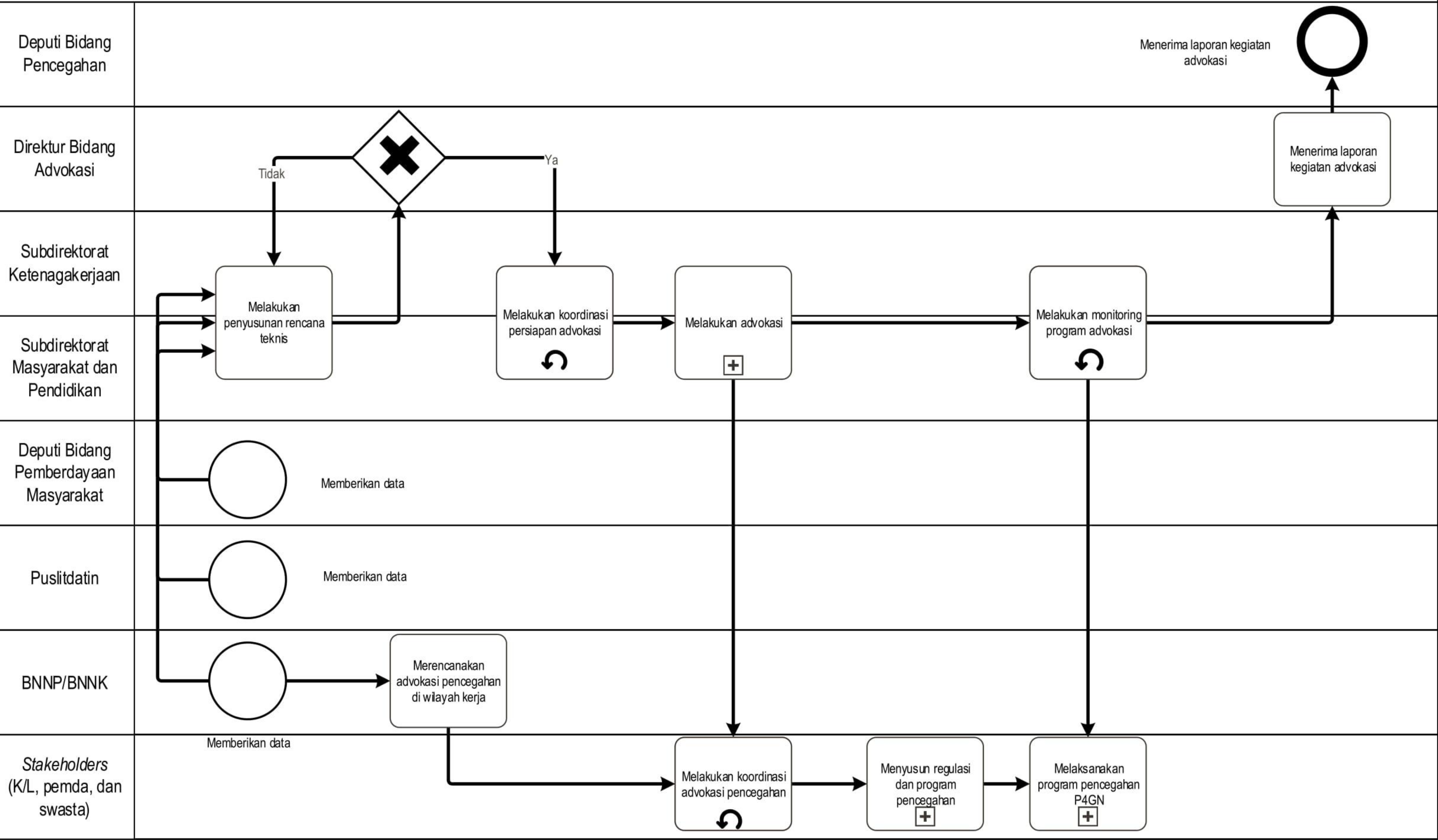
LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENATAAN TATA LAKSANA (*BUSINESS PROCESS*)
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan (demi meraih tujuan tertentu). Proses Bisnis Badan Narkotika Nasional memuat seluruh Proses Bisnis sesuai bidang tugas dan fungsi struktur organisasi yang ada di BNN, BNNP dan BNNKab/Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna layanan maupun para pemangku kepentingan.

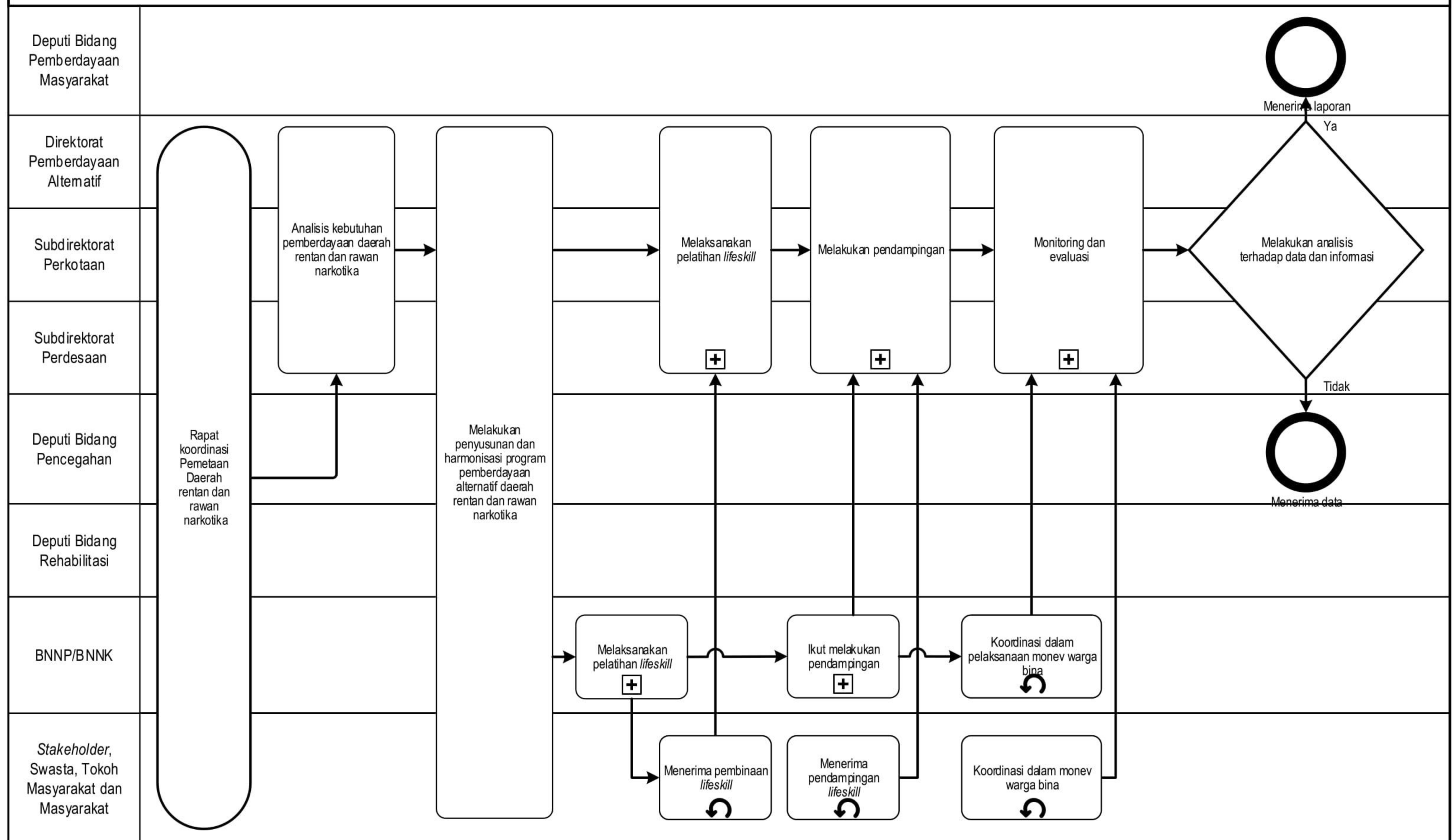
BNN 01.01 DISEMINASI INFORMASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA



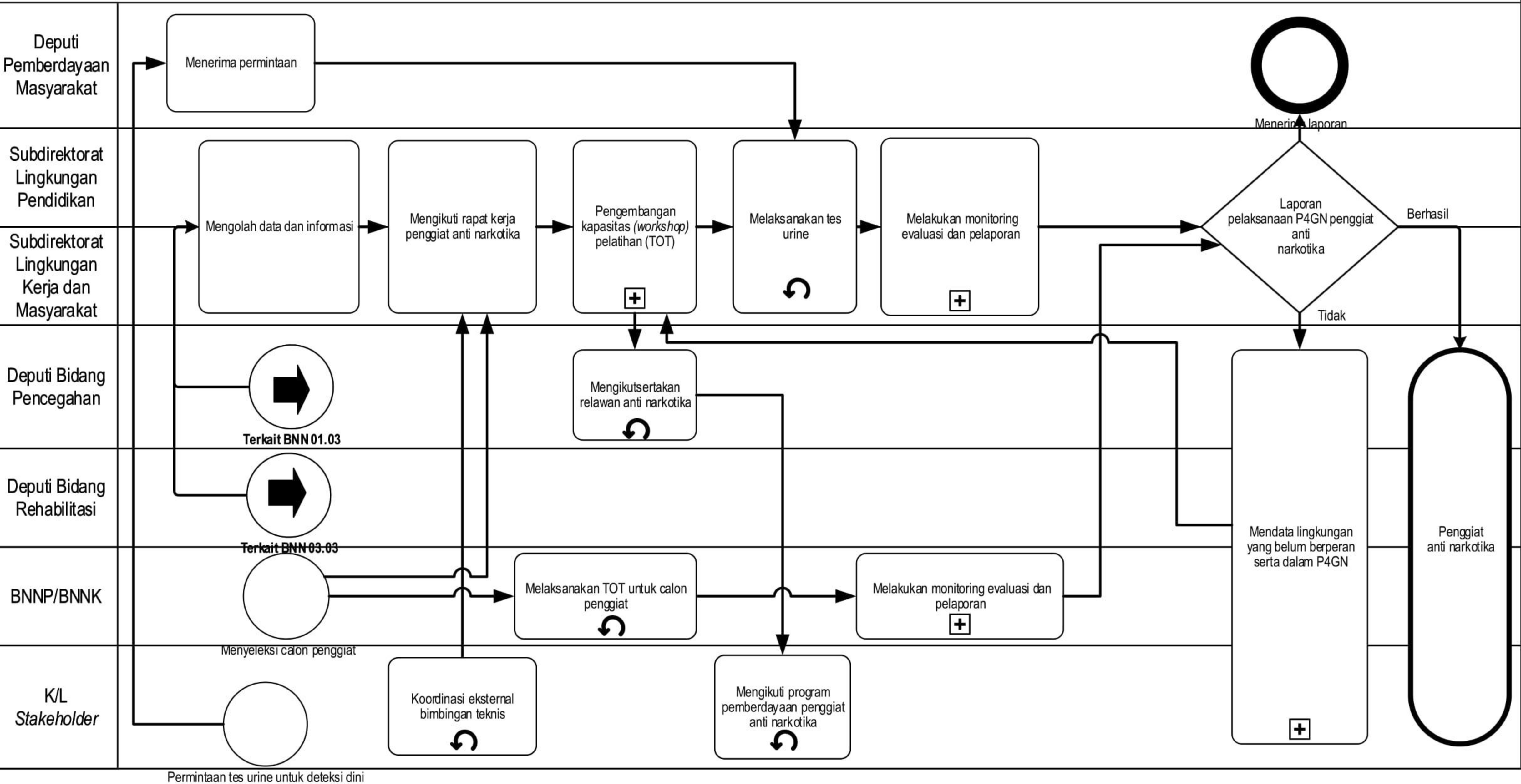
BNN.01.02. ADVOKASI KEBIJAKAN P4GN



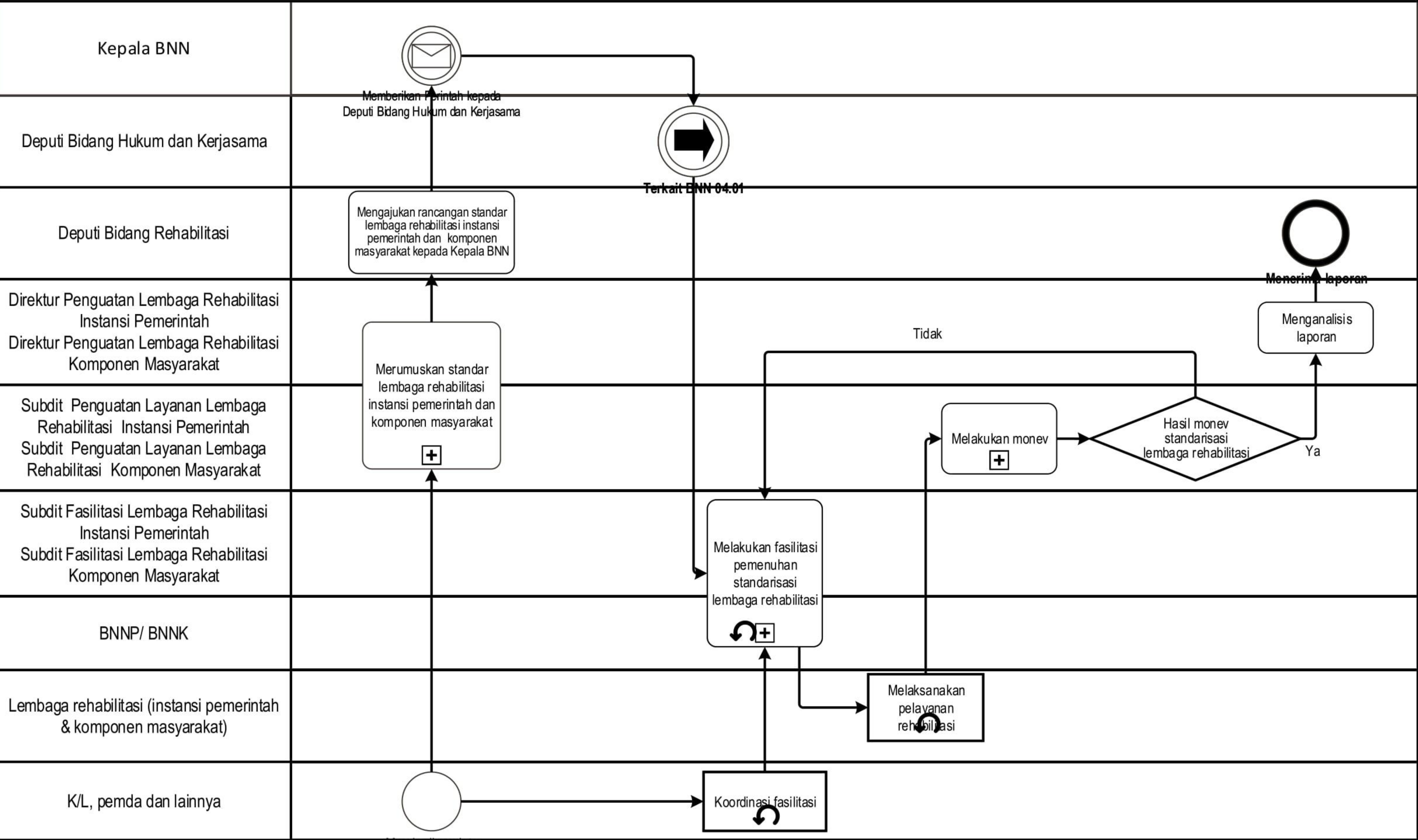
BNN 01.03 PEMBINAAN DAERAH RENTAN DAN RAWAN NARKOTIKA



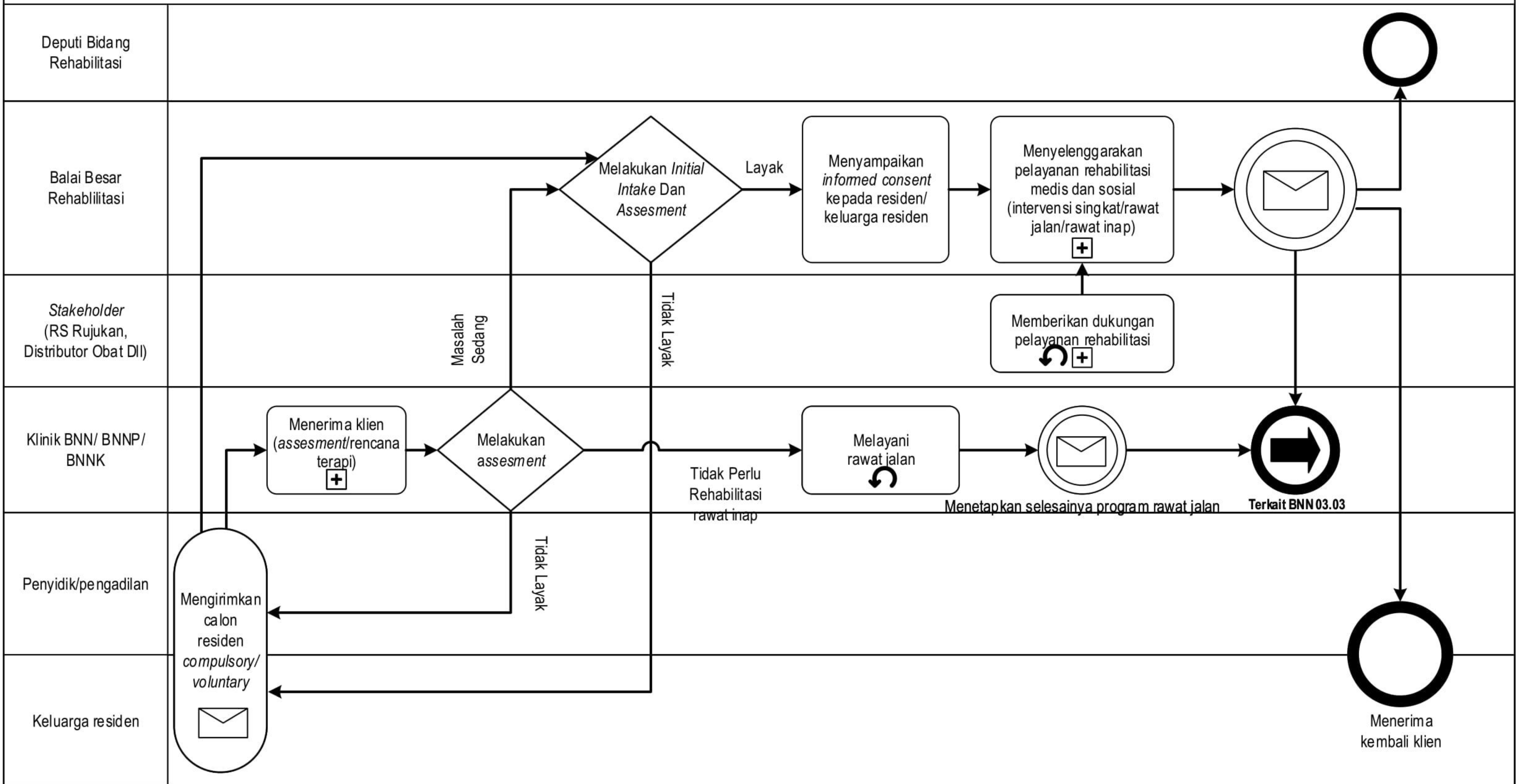
BNN 01.04 PEMBERDAYAAN PENGGIAT ANTI NARKOTIKA



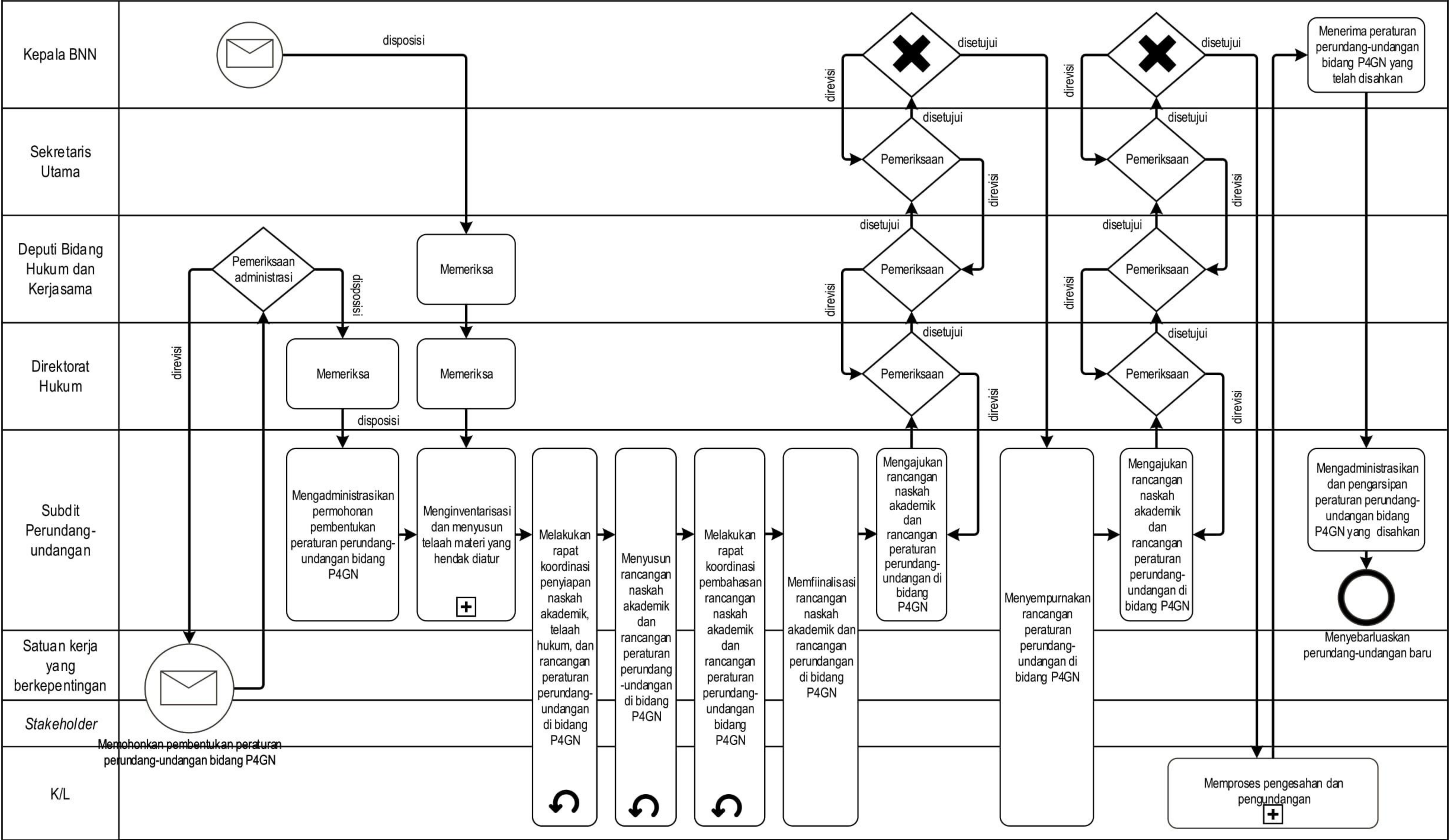
BNN 03.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA REHABILITASI



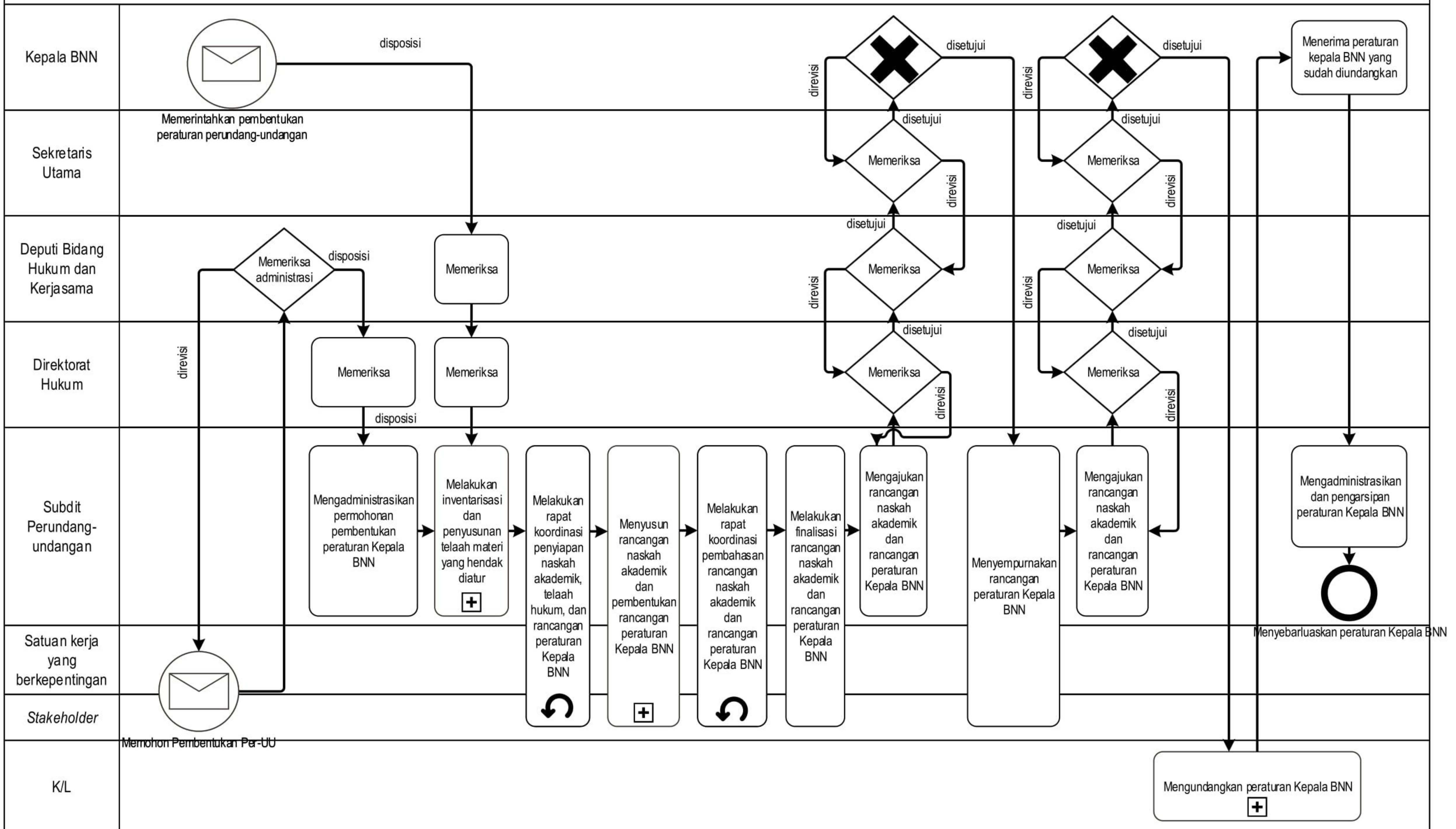
BNN 03.02 PELAYANAN REHABILITASI BNN



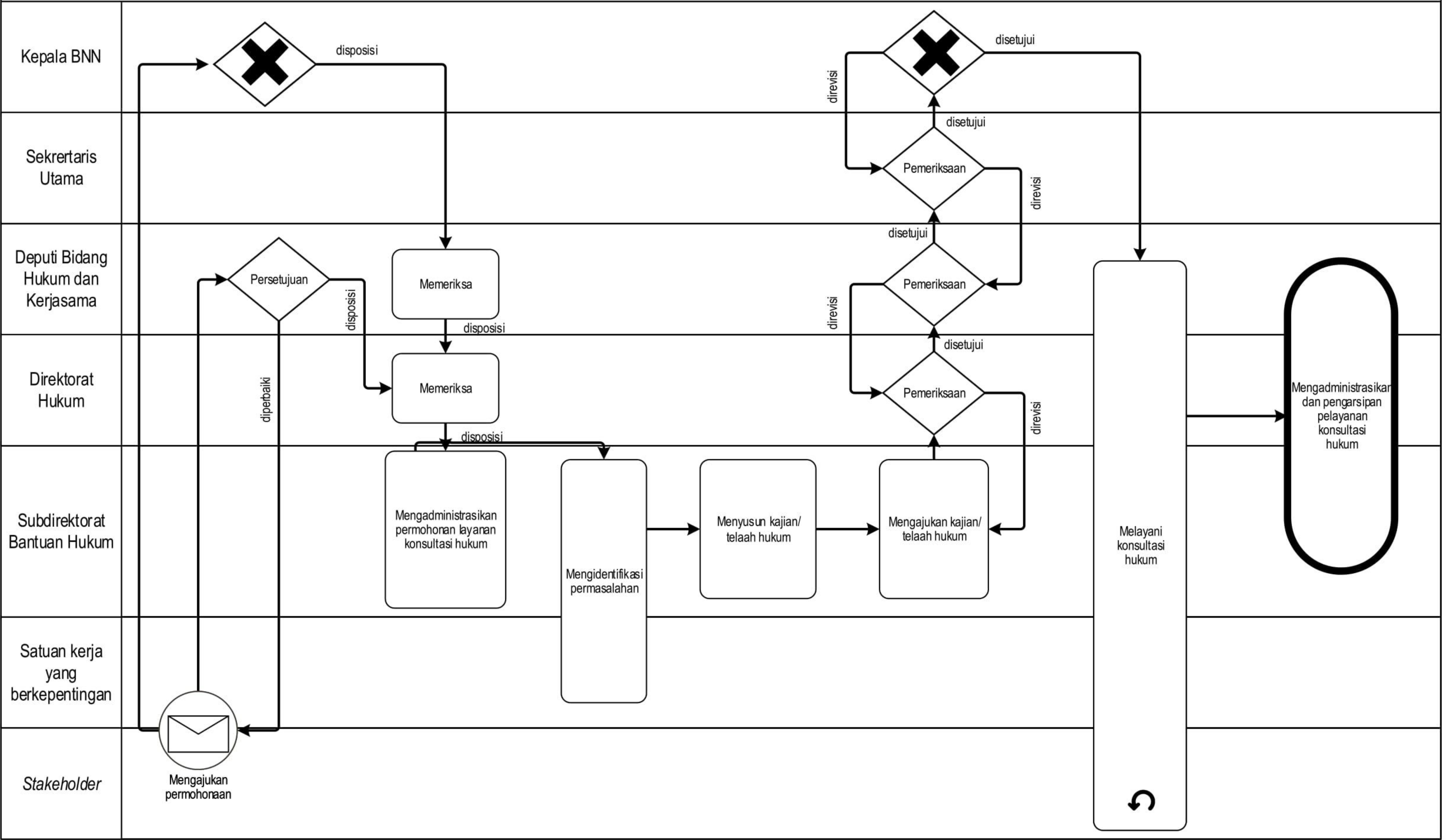
BNN 04.01 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SELAIN PERATURAN KEPALA BNN



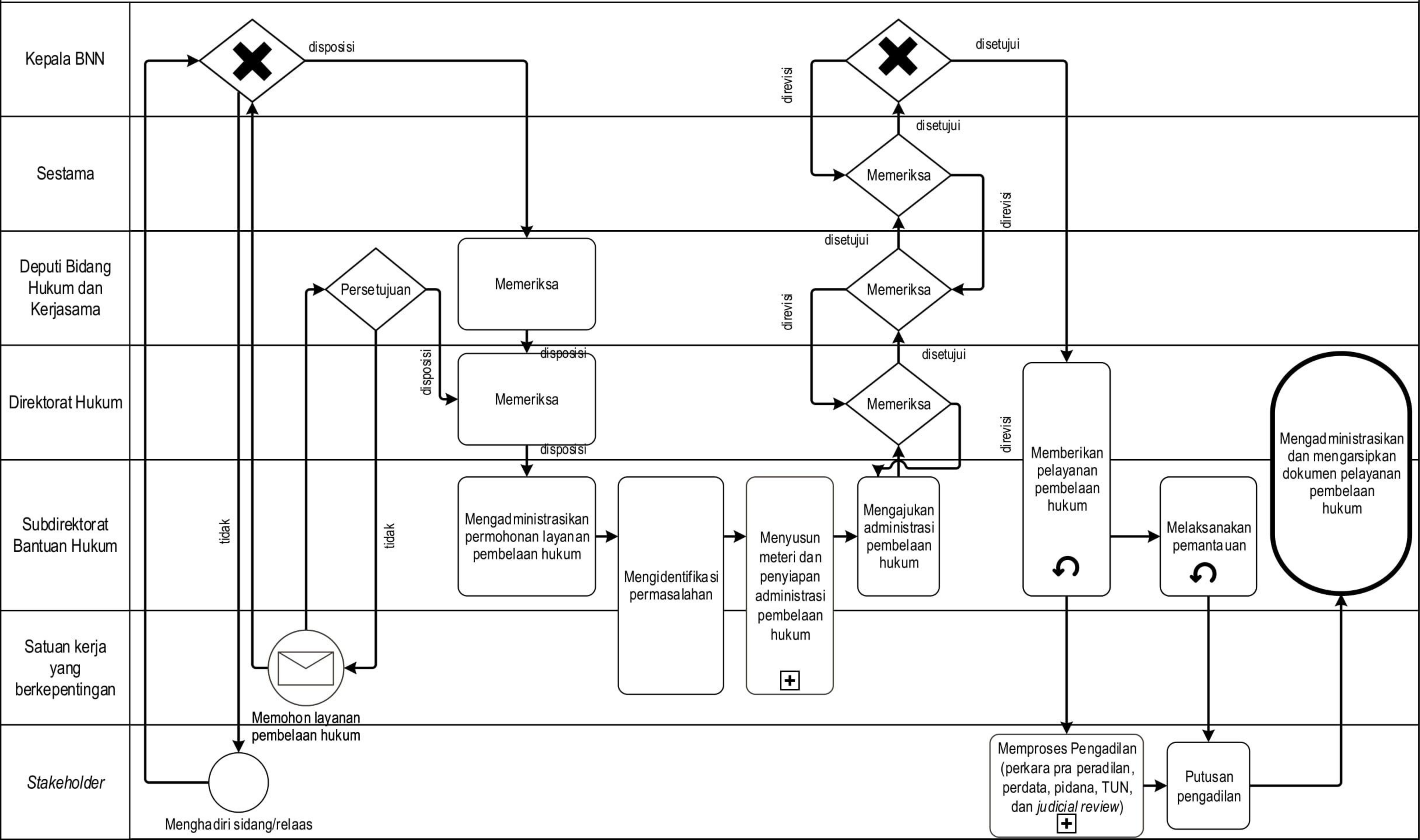
BNN 04.02 PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BNN



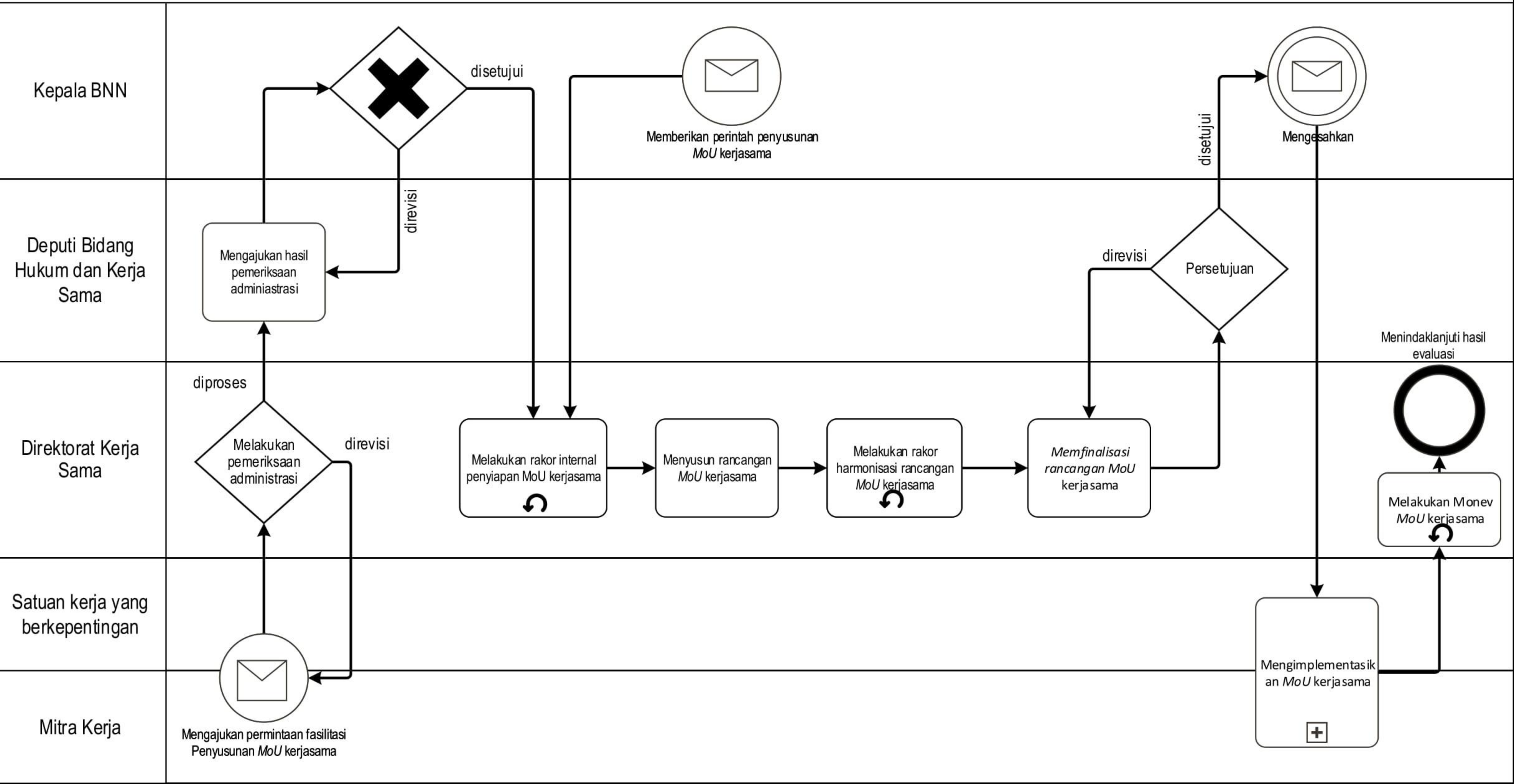
BNN 04.03 LAYANAN KONSULTANSI HUKUM



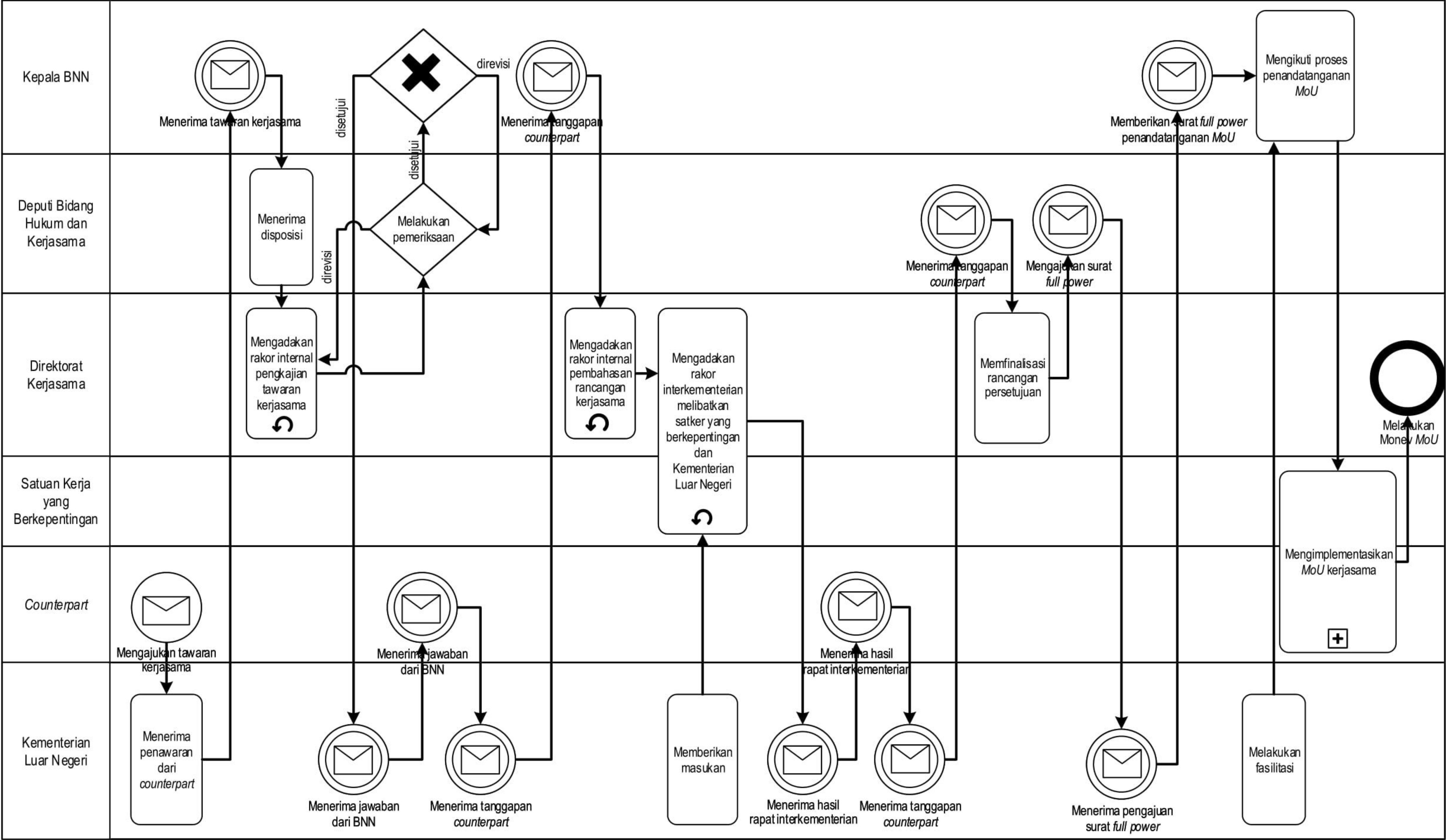
BNN 04.04 LAYANAN PEMBELAAN HUKUM



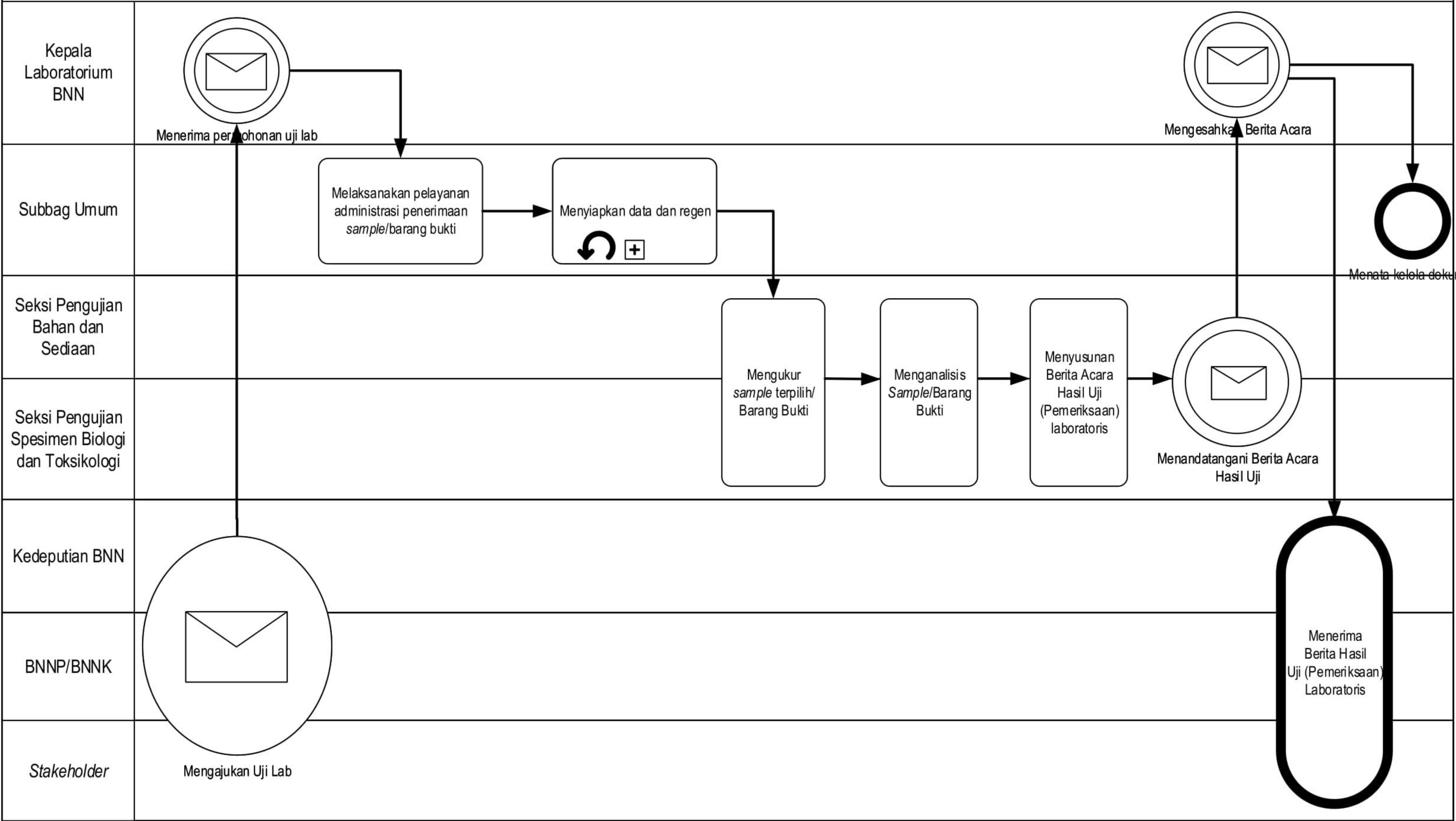
BNN 05.01 PENYUSUNAN DOKUMEN KERJA SAMA NASIONAL

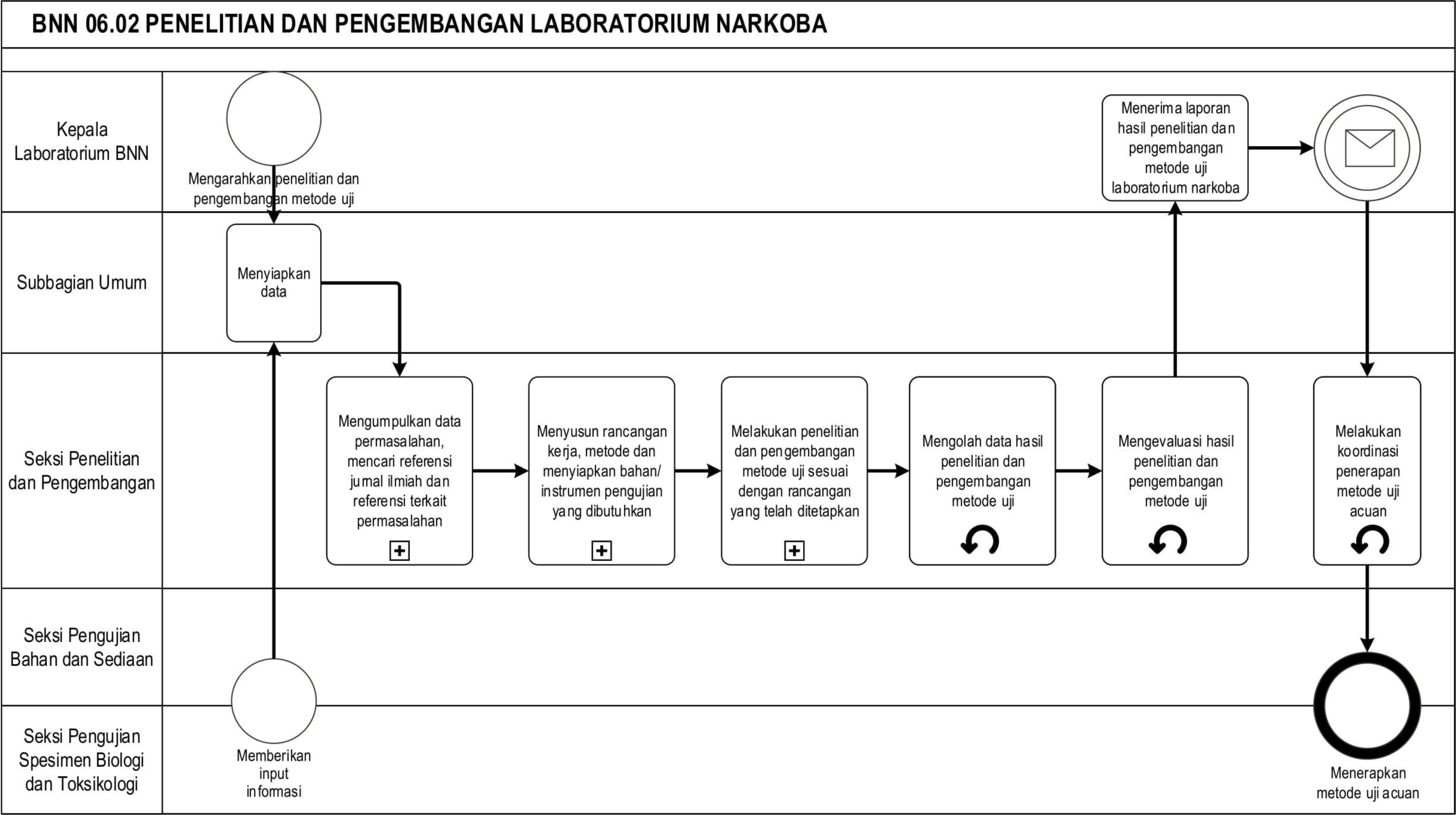


BNN 05.02 PENYUSUNAN DOKUMEN KERJASAMA INTERNASIONAL (USULAN *COUNTERPART*)

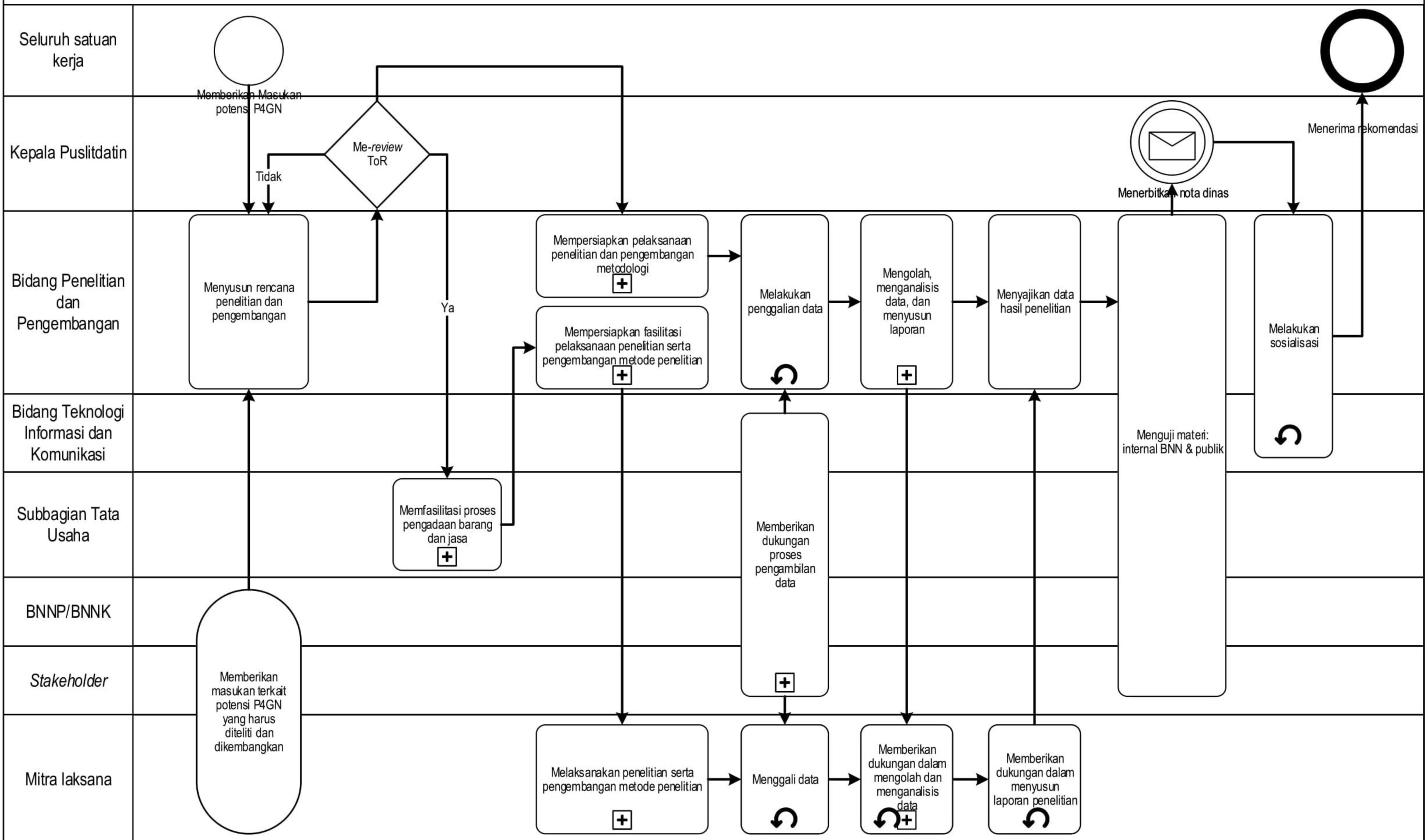


BNN 06.01 PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM

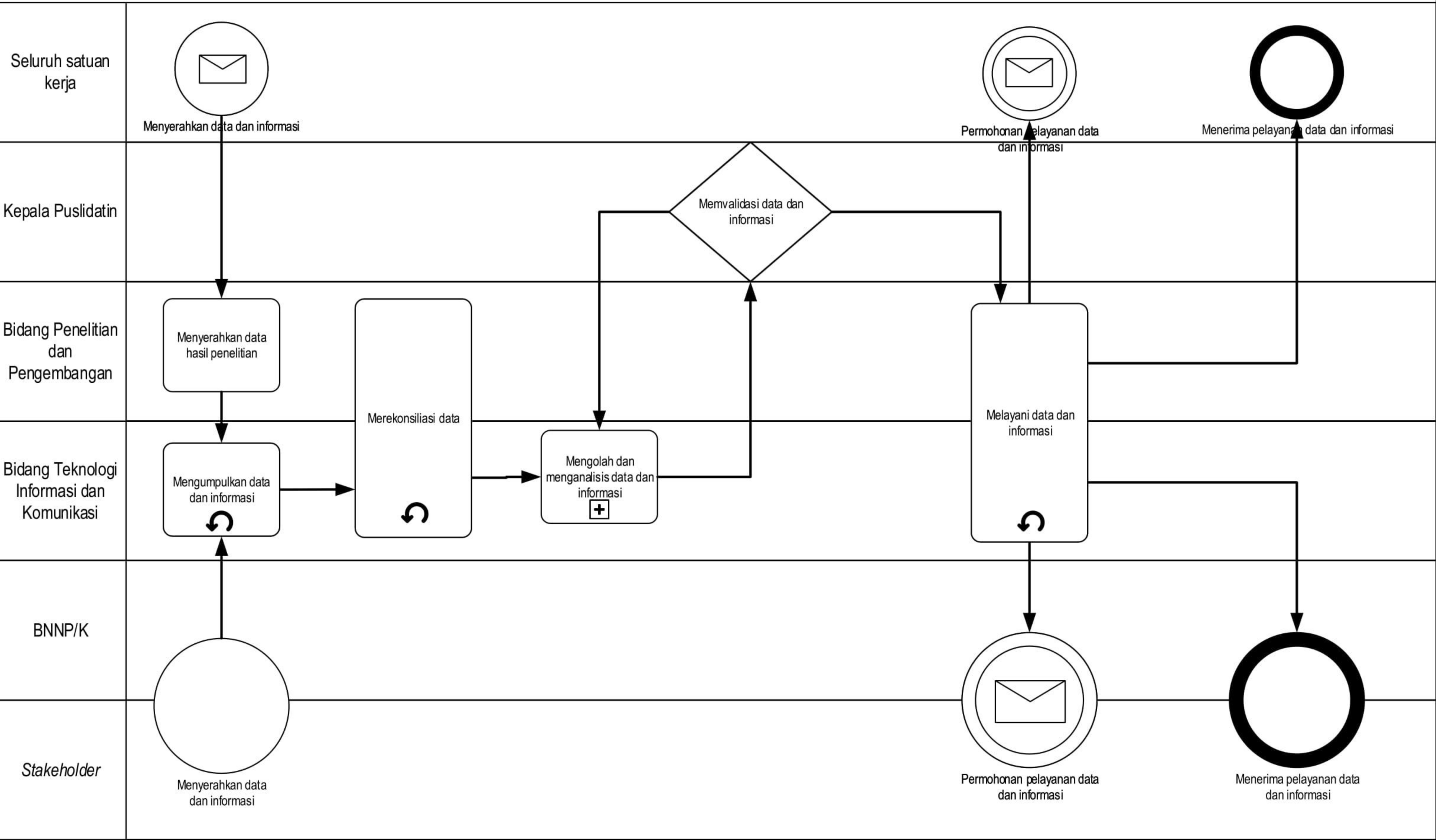




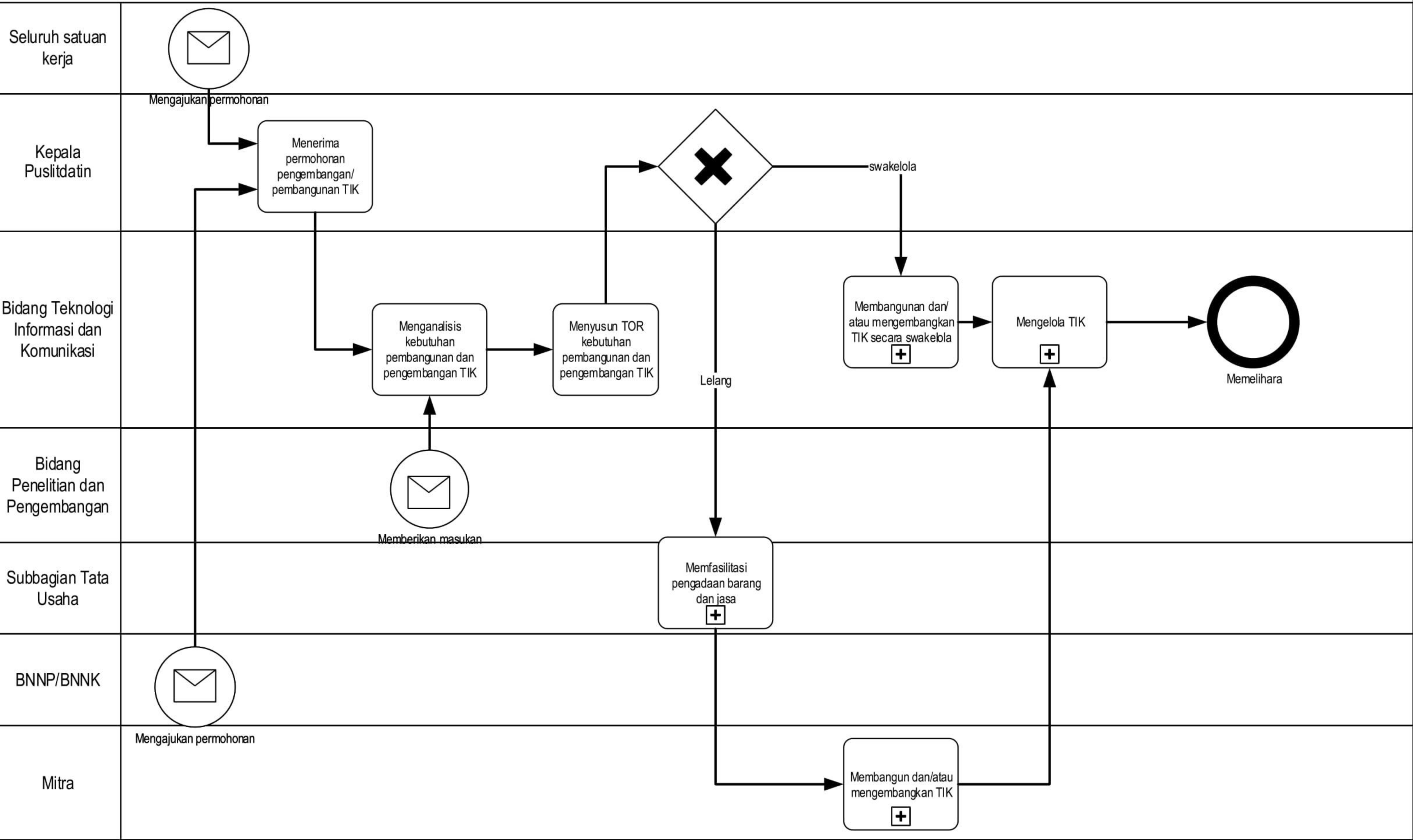
BNN 07.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG P4GN



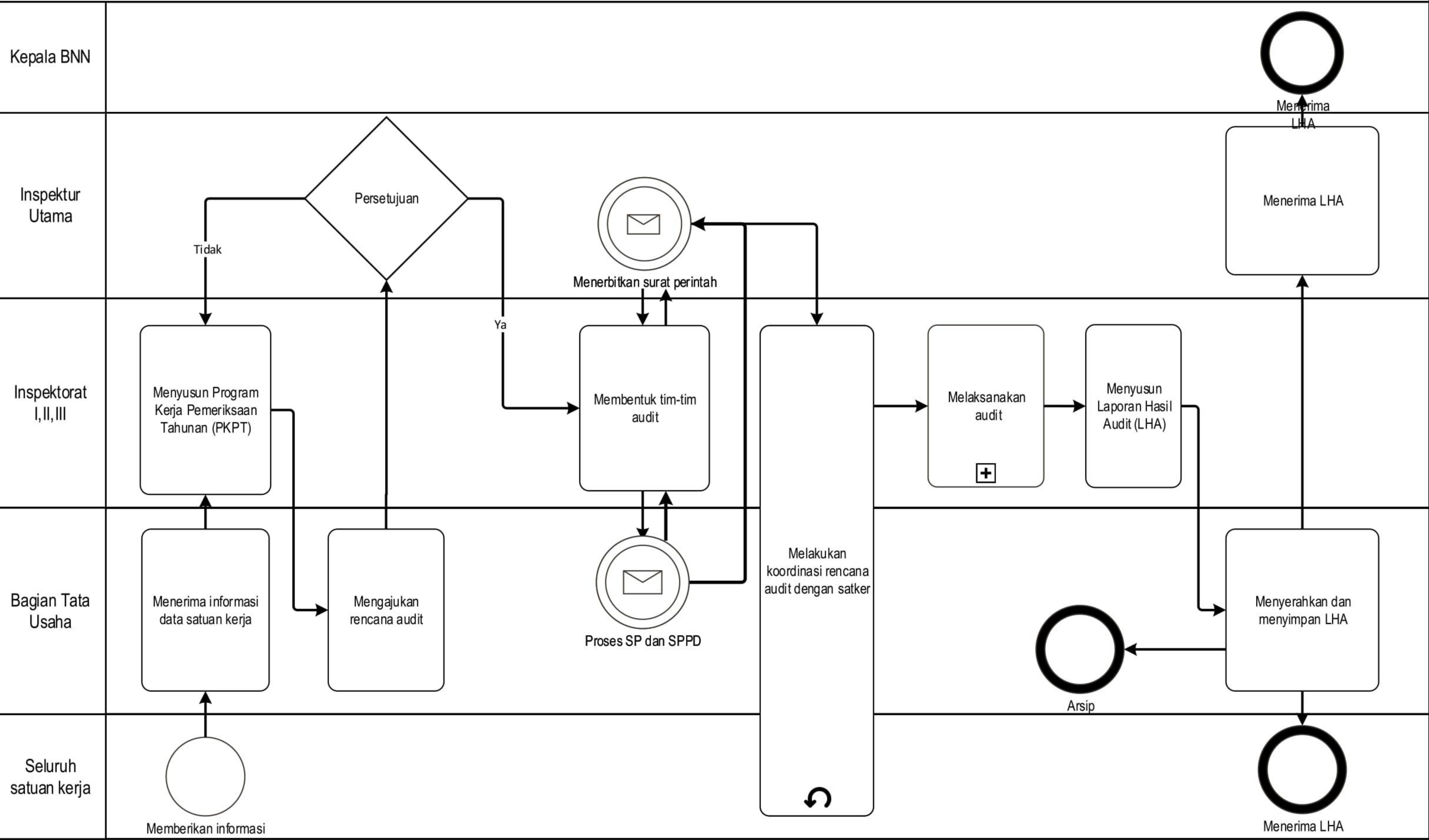
BNN 07.02 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DI BIDANG P4GN



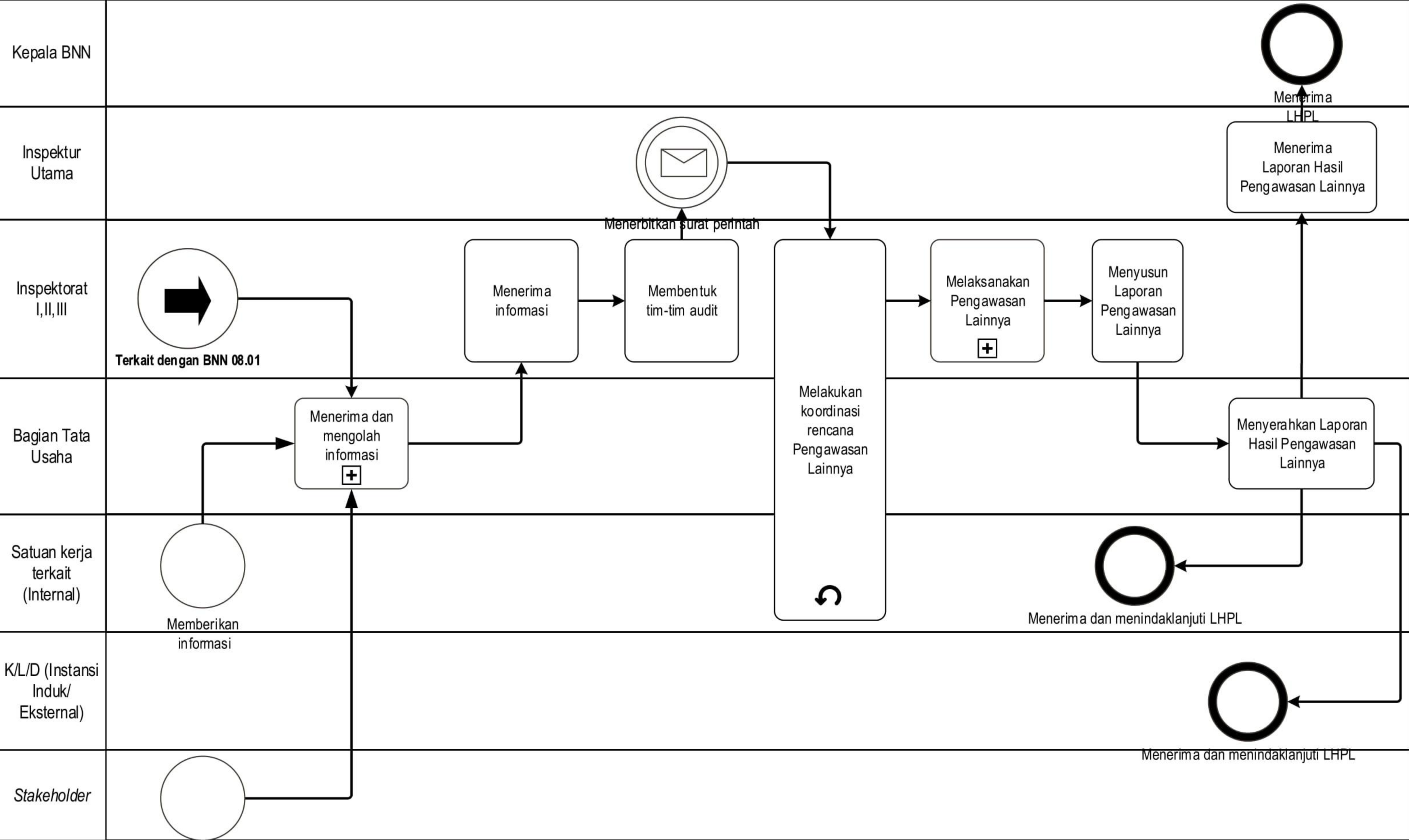
BNN 07.03 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI BIDANG P4GN



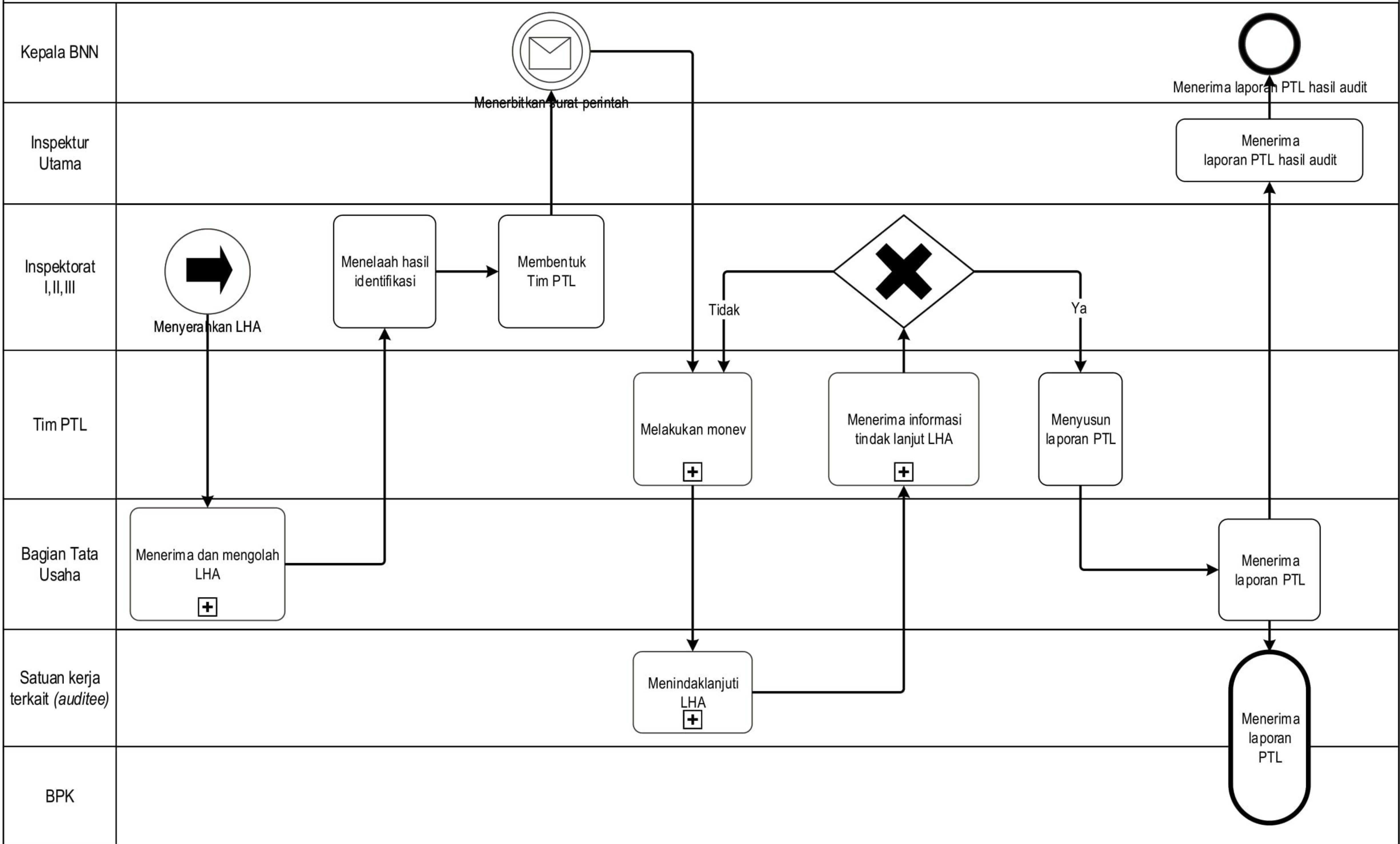
BNN 08.01 AUDIT KEUANGAN DAN KINERJA

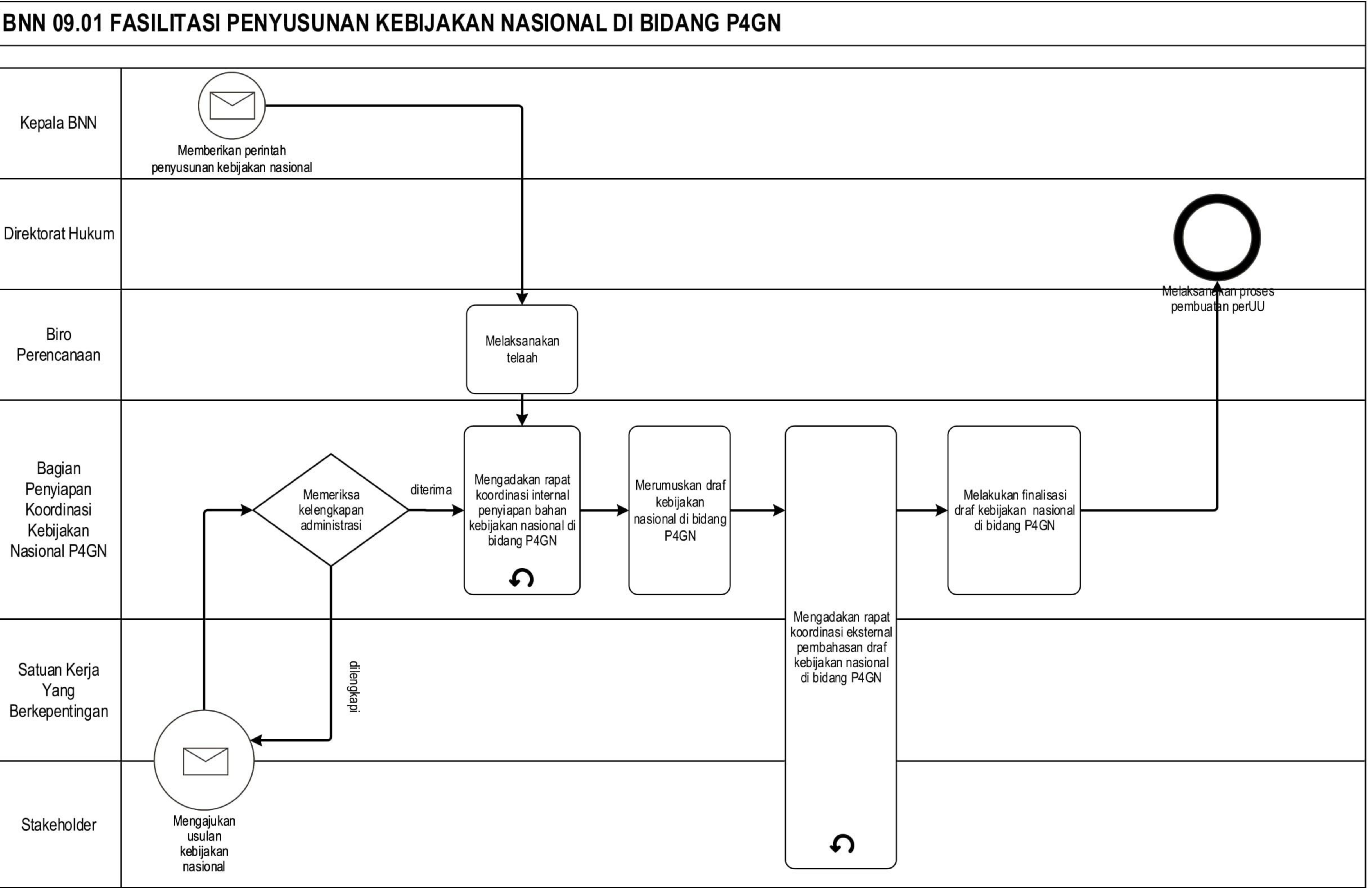


BNN 08.02 PENGAWASAN LAINNYA

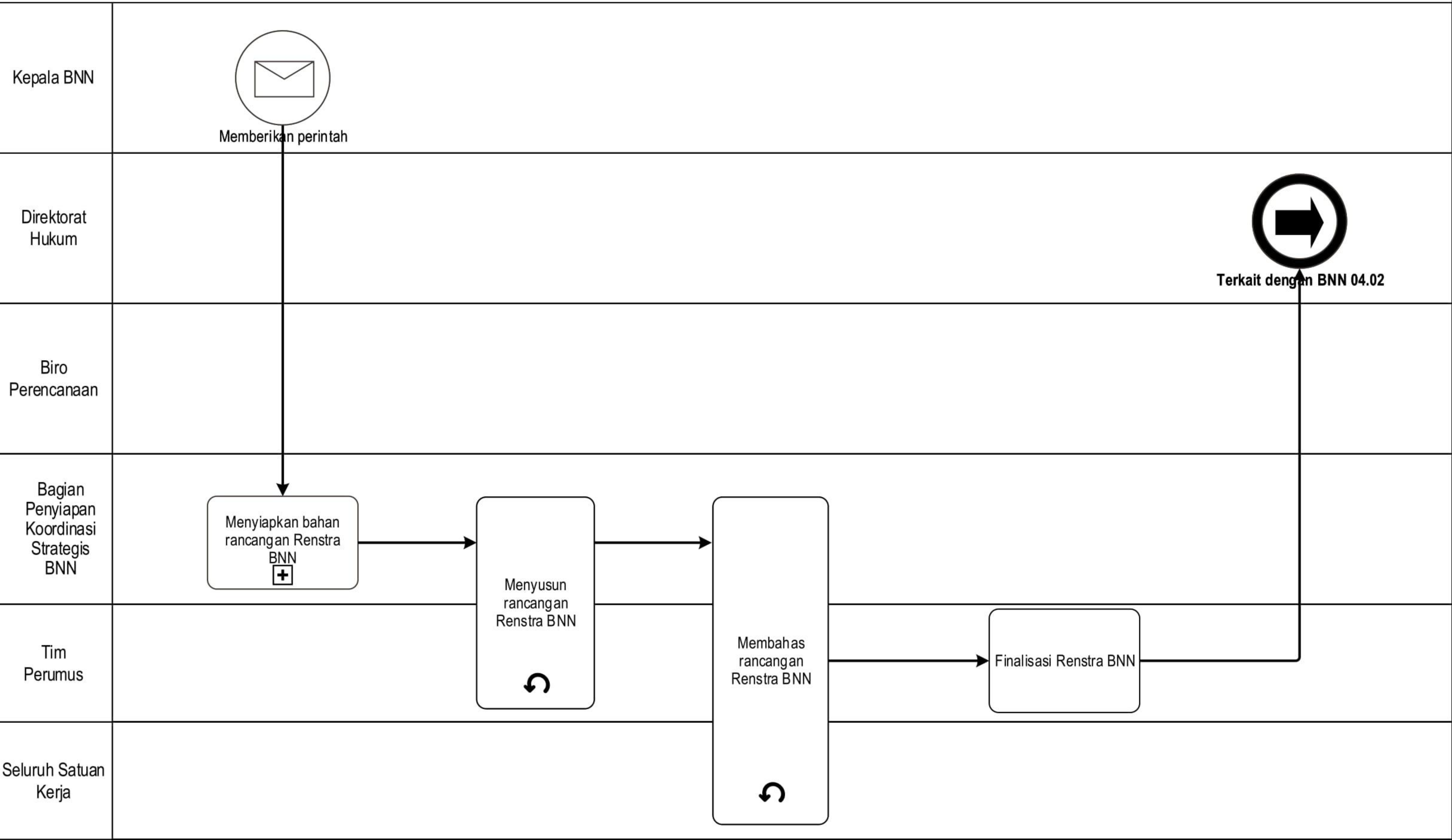


BNN 08.03 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

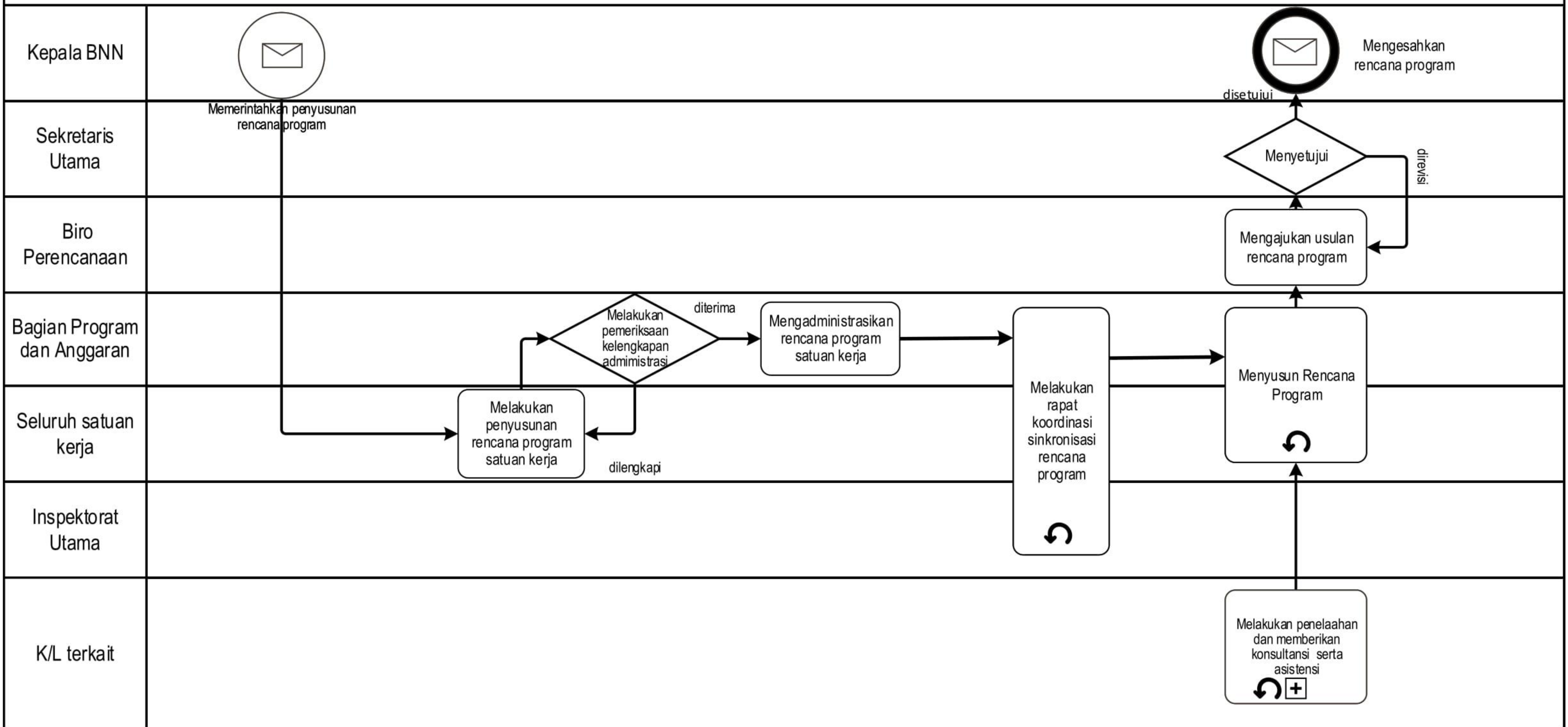




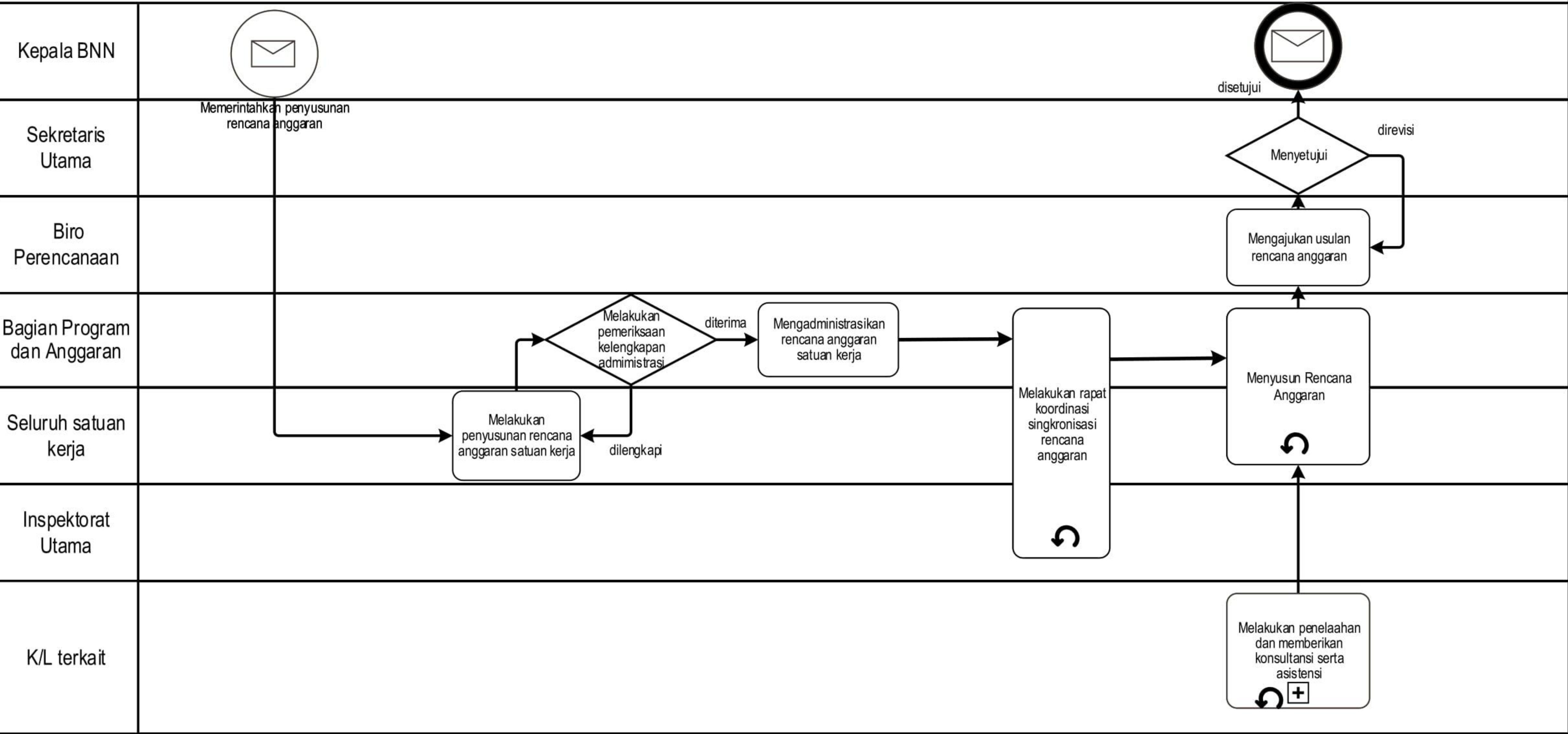
BNN 09.02 PENYUSUNAN RENSTRA BNN



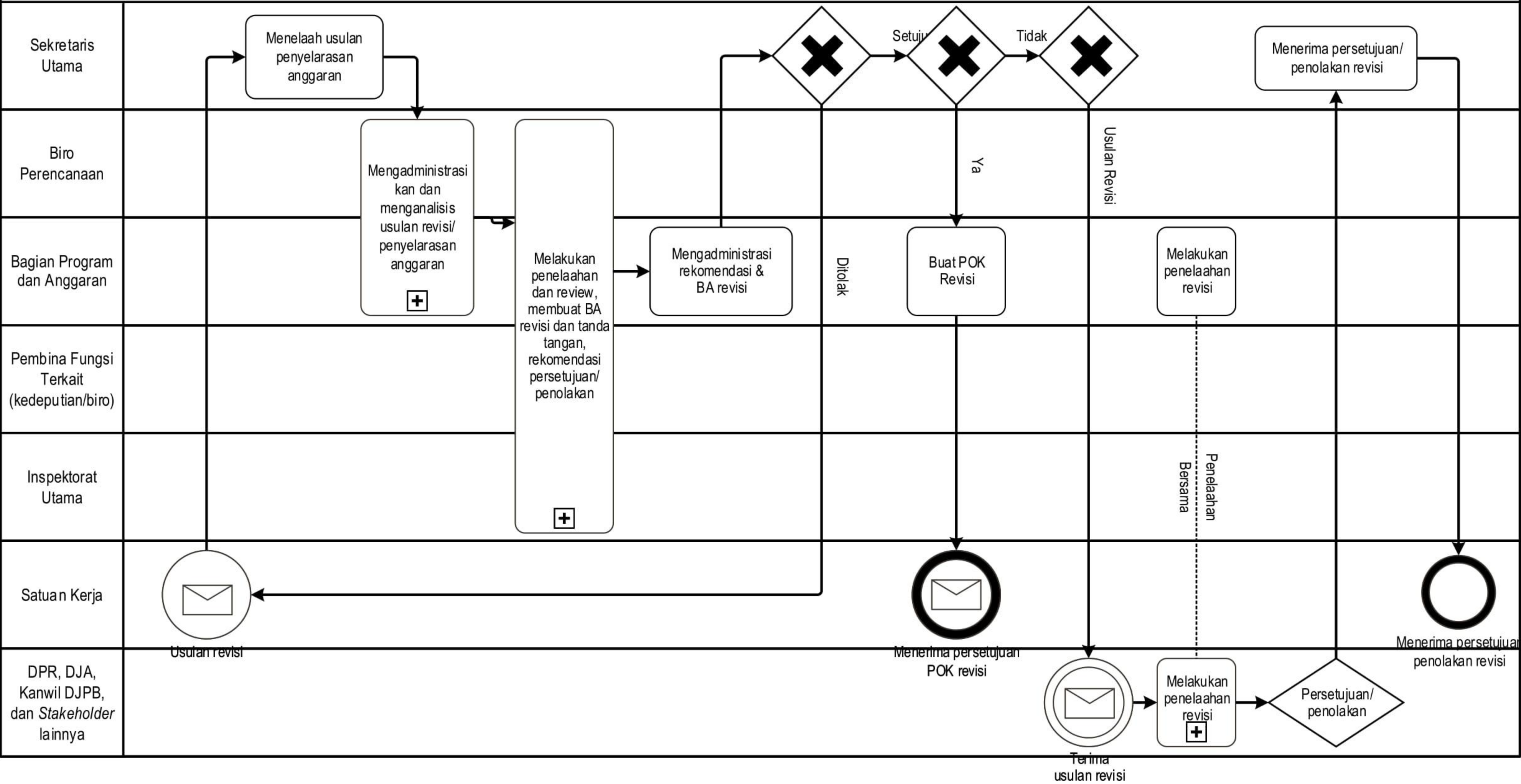
BNN 09.03 PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DI LINGKUNGAN BNN



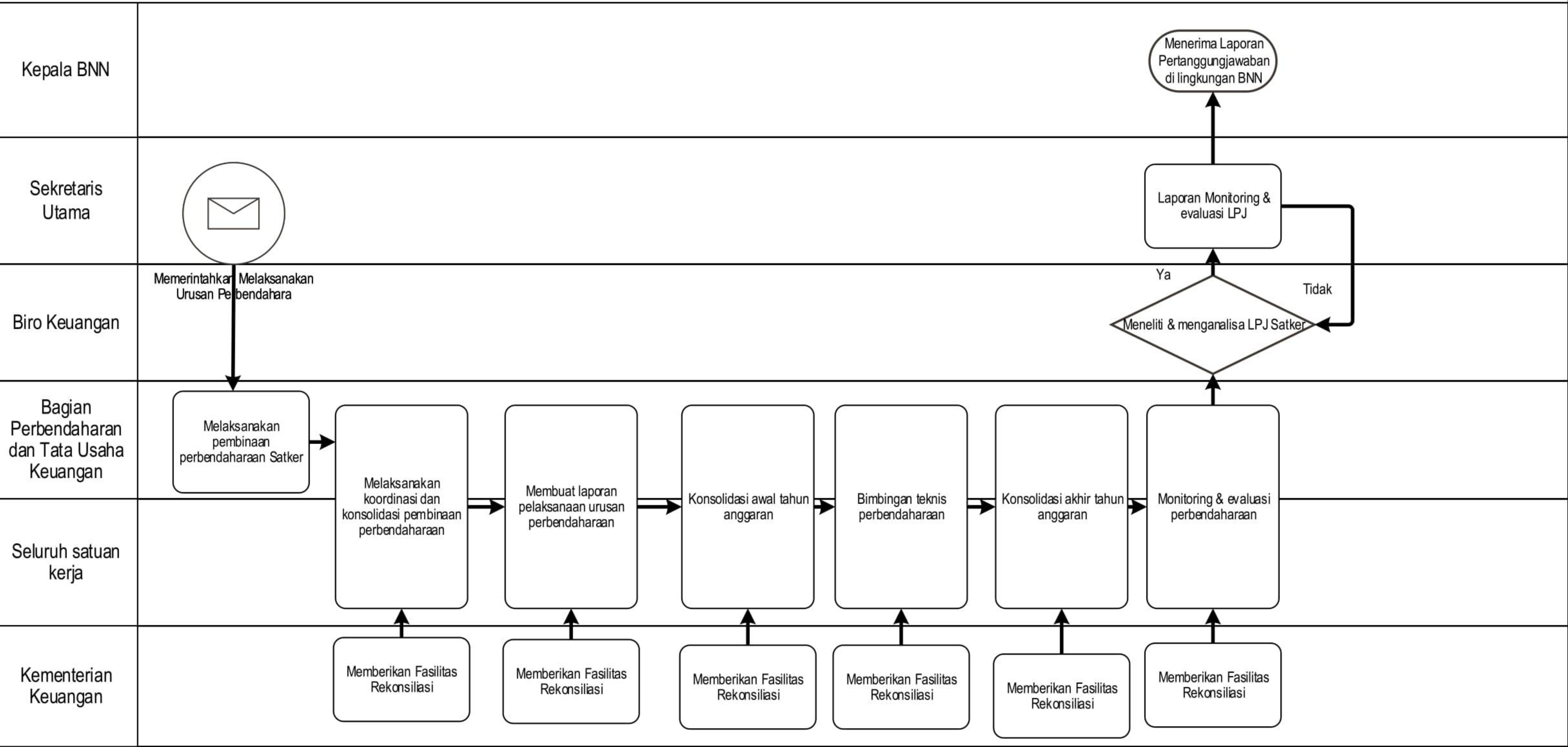
BNN 09.04 PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DI LINGKUNGAN BNN



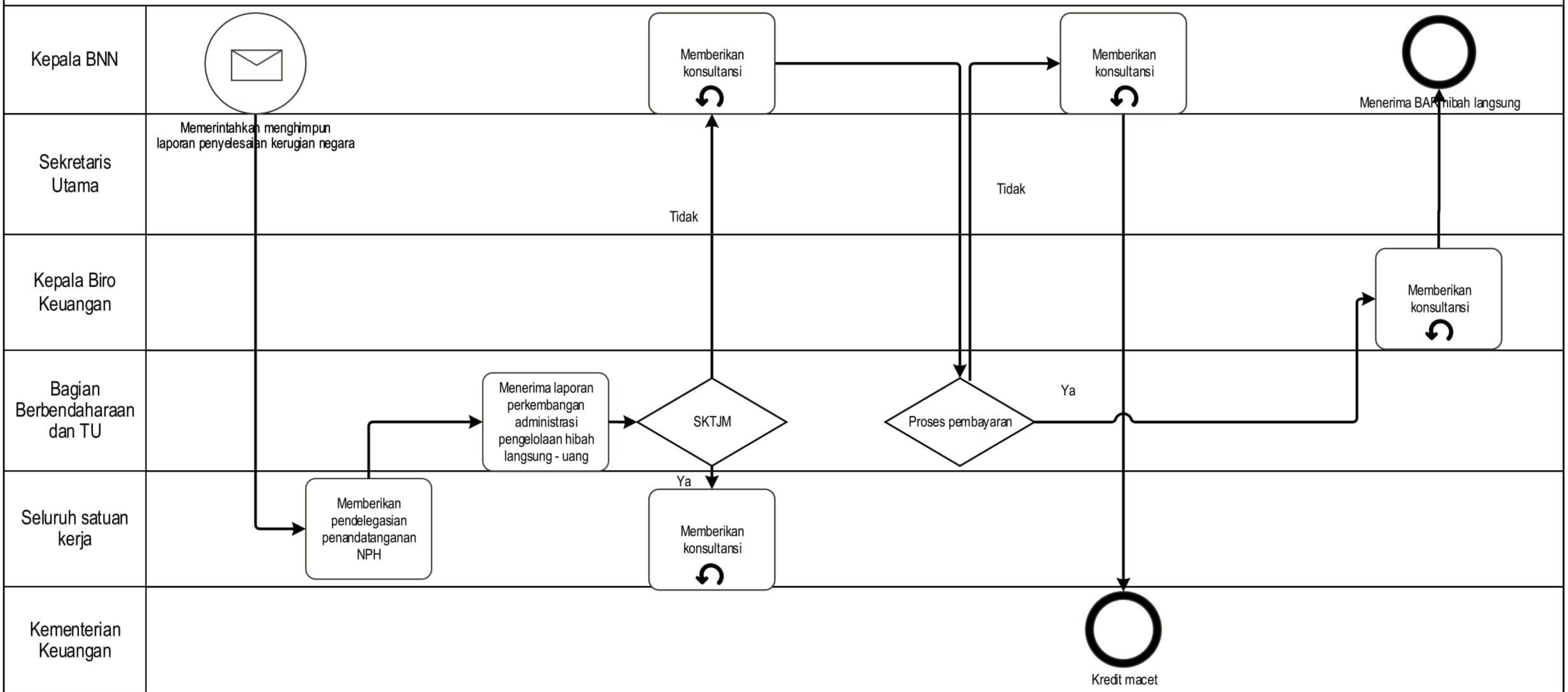
BNN 09.05 PENYELARASAN ANGGARAN BNN



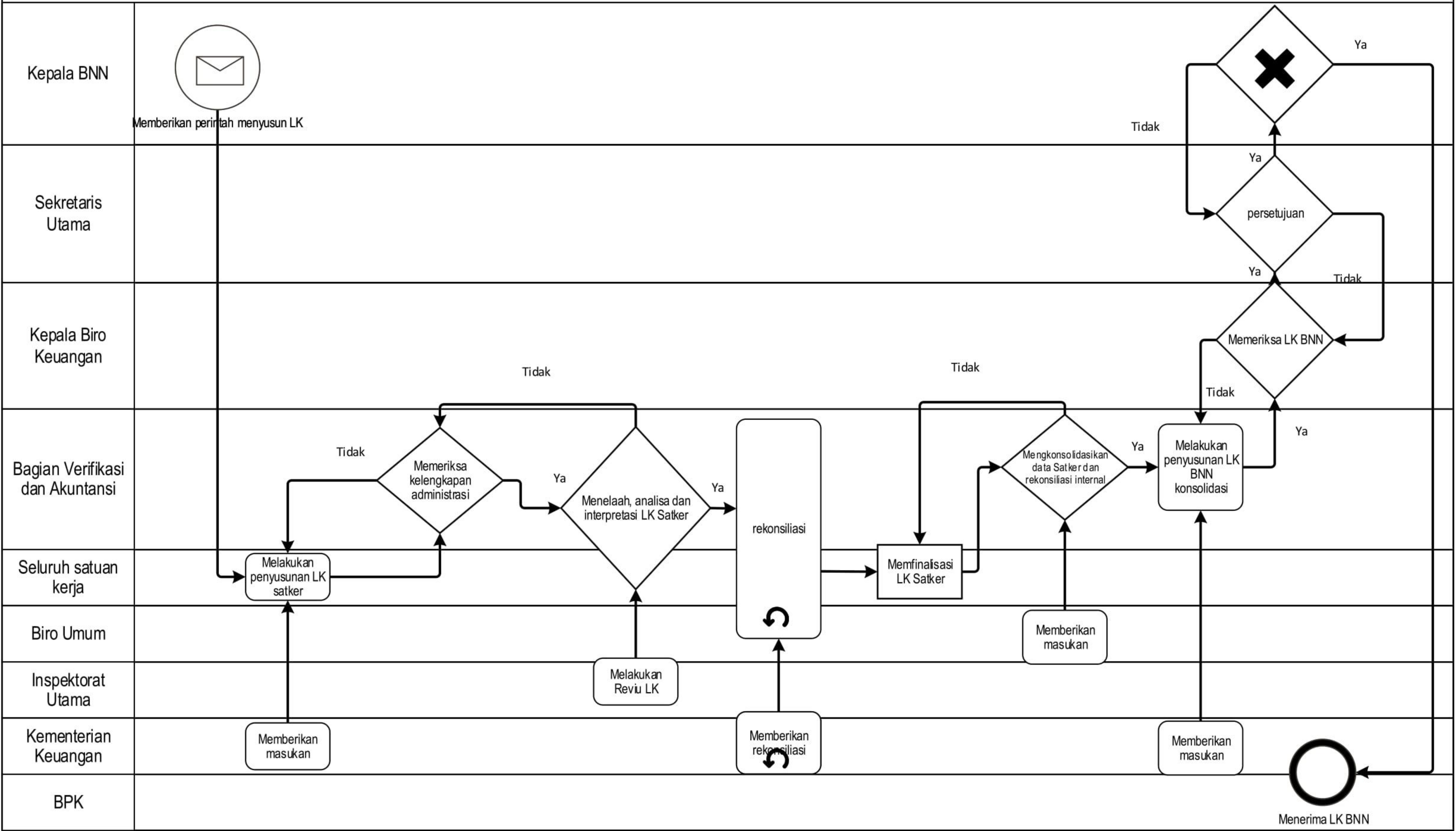
BNN 10.01 PELAKSANAAN URUSAN PERBENDAHARAAN



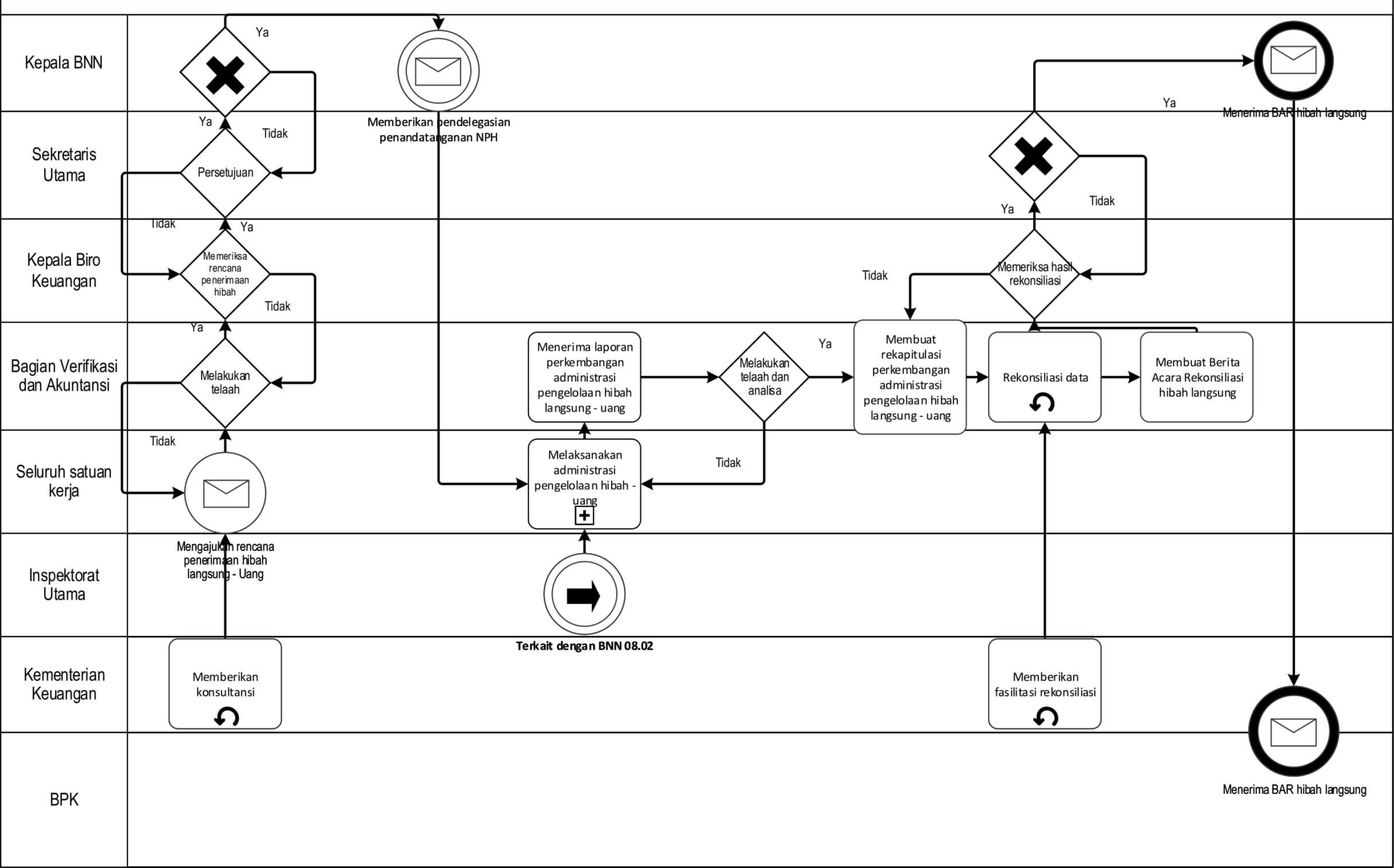
BNN 10.02 PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN KERUGIAN NEGARA



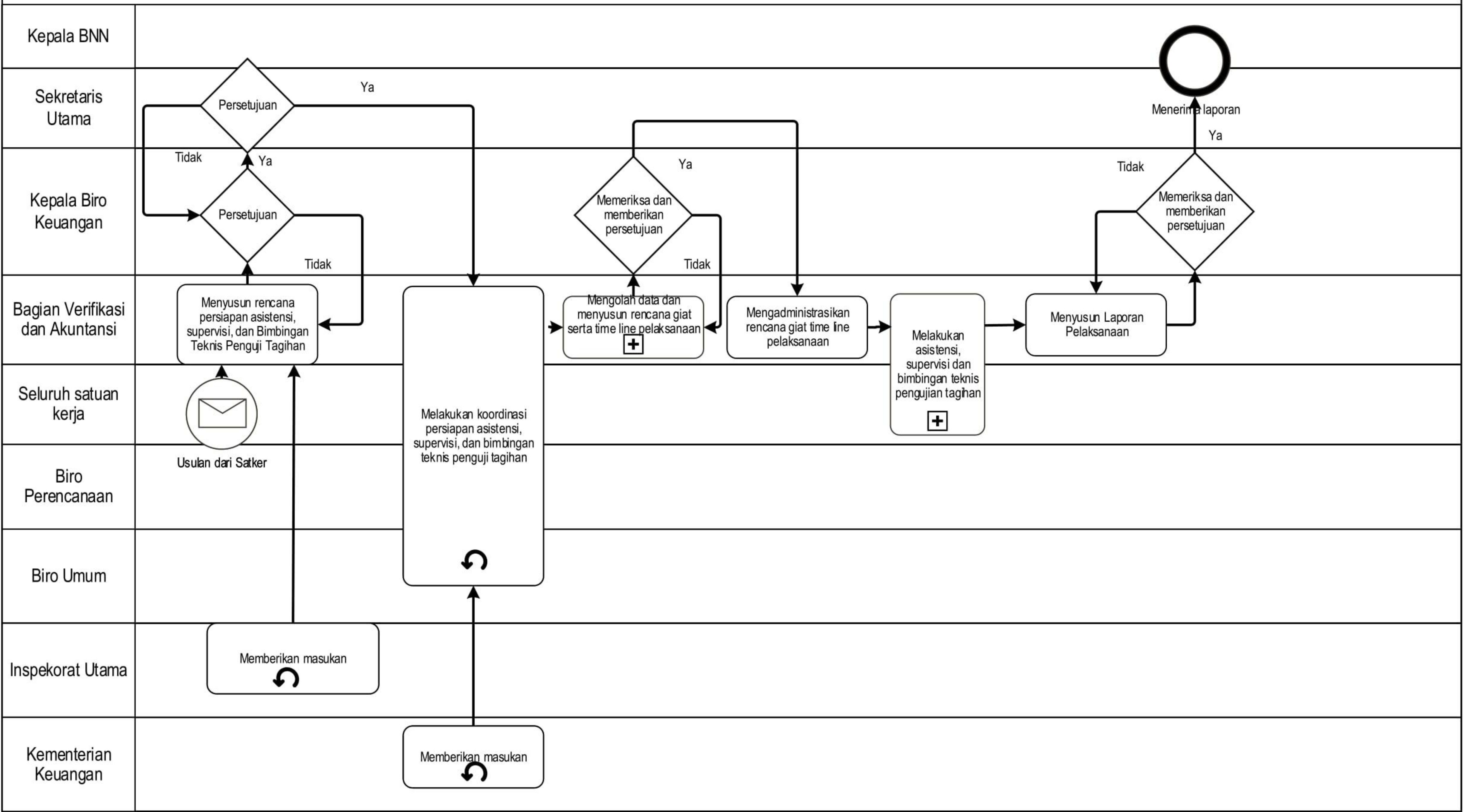
BNN 10.04 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BNN



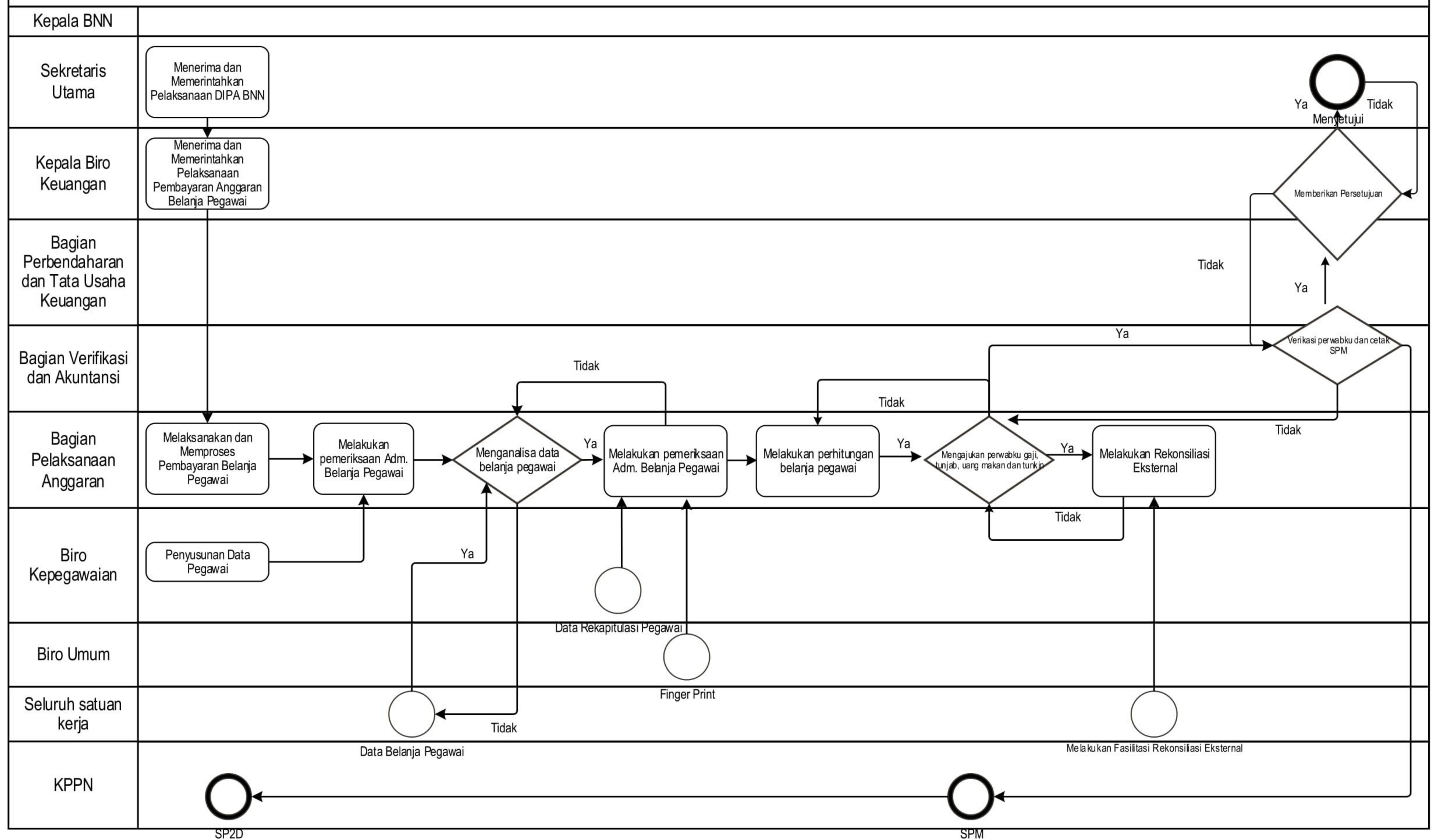
BNN 10.05 ADMINISTRASI PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG - UANG



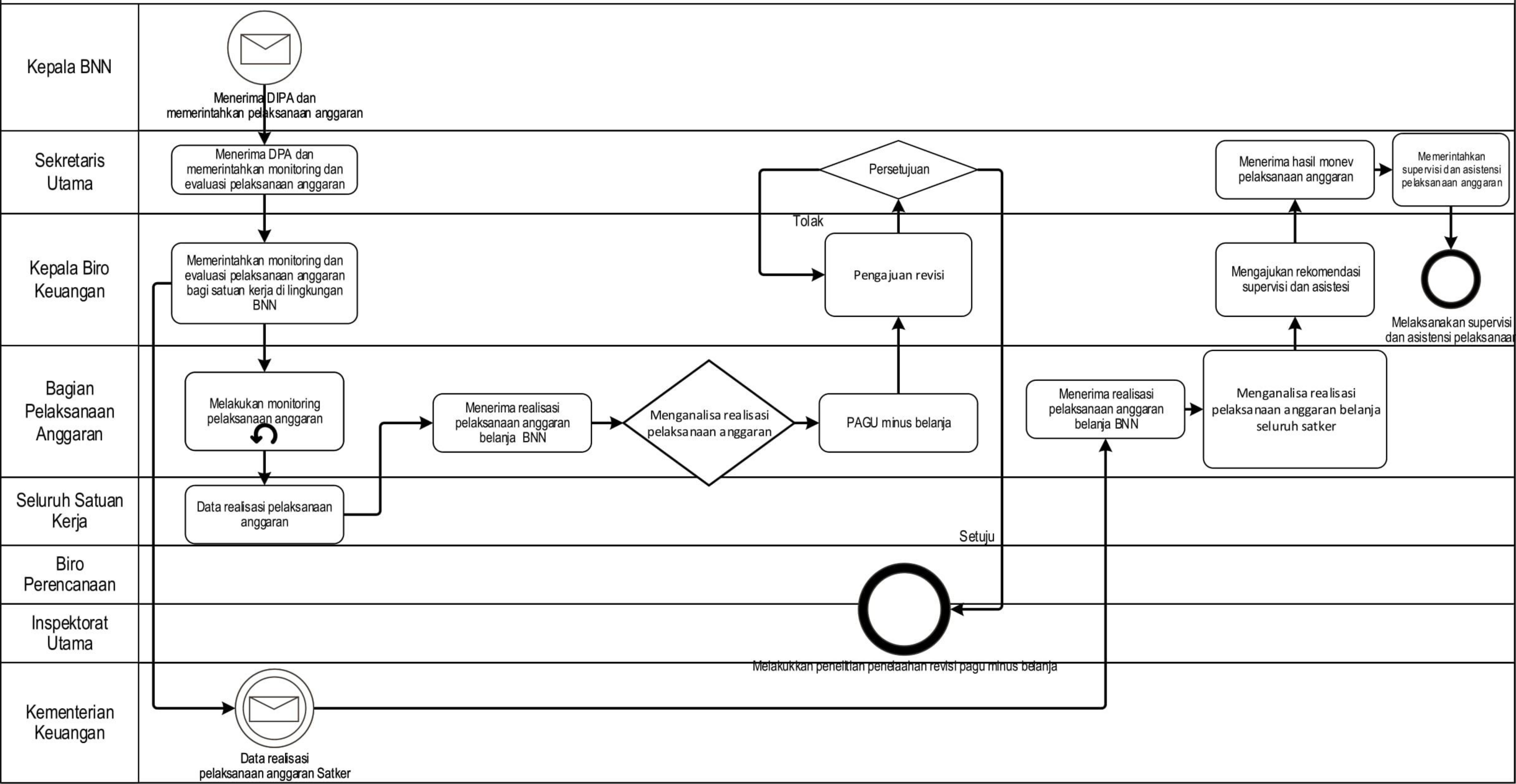
BNN 10.05 VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN



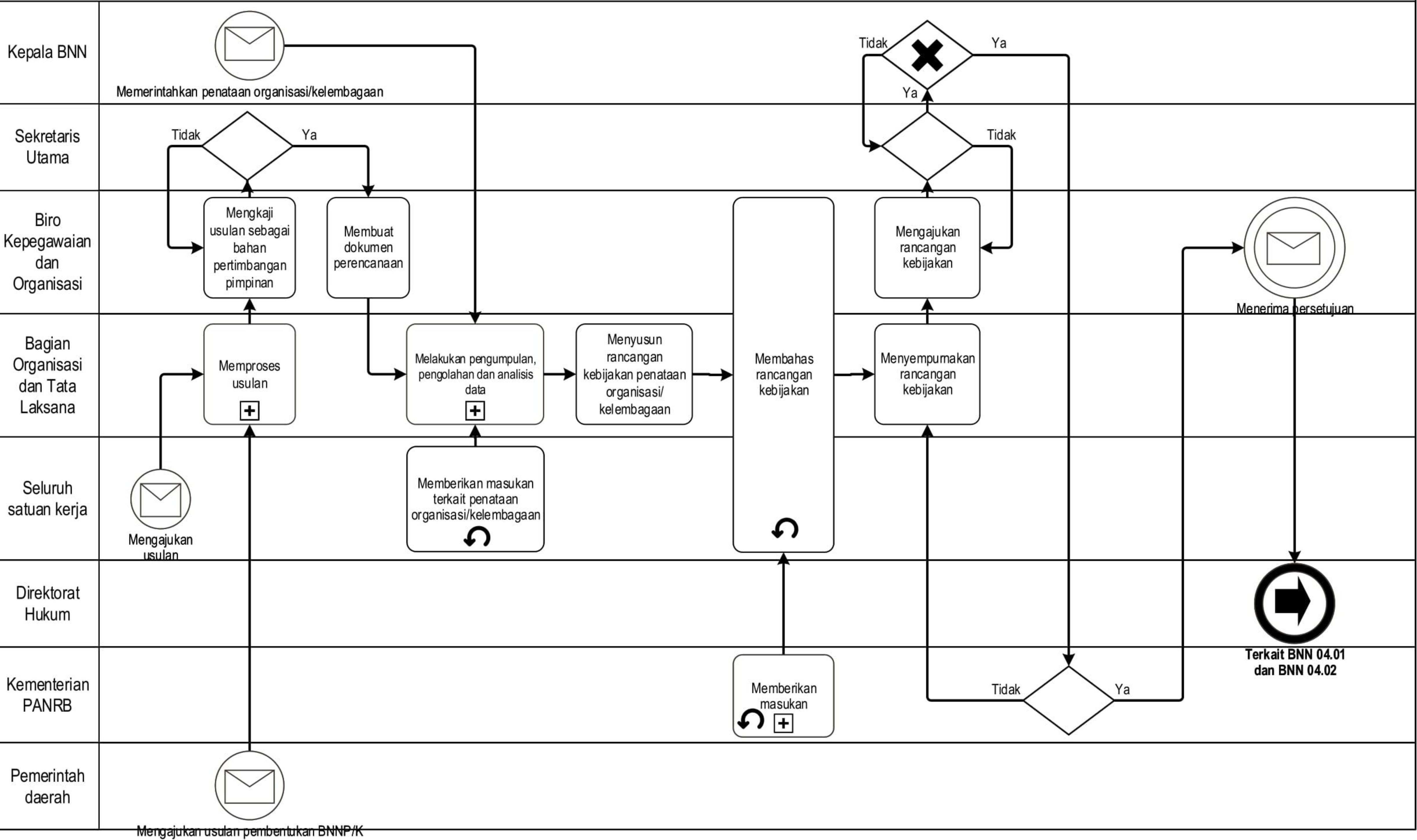
BNN 10.07 PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI



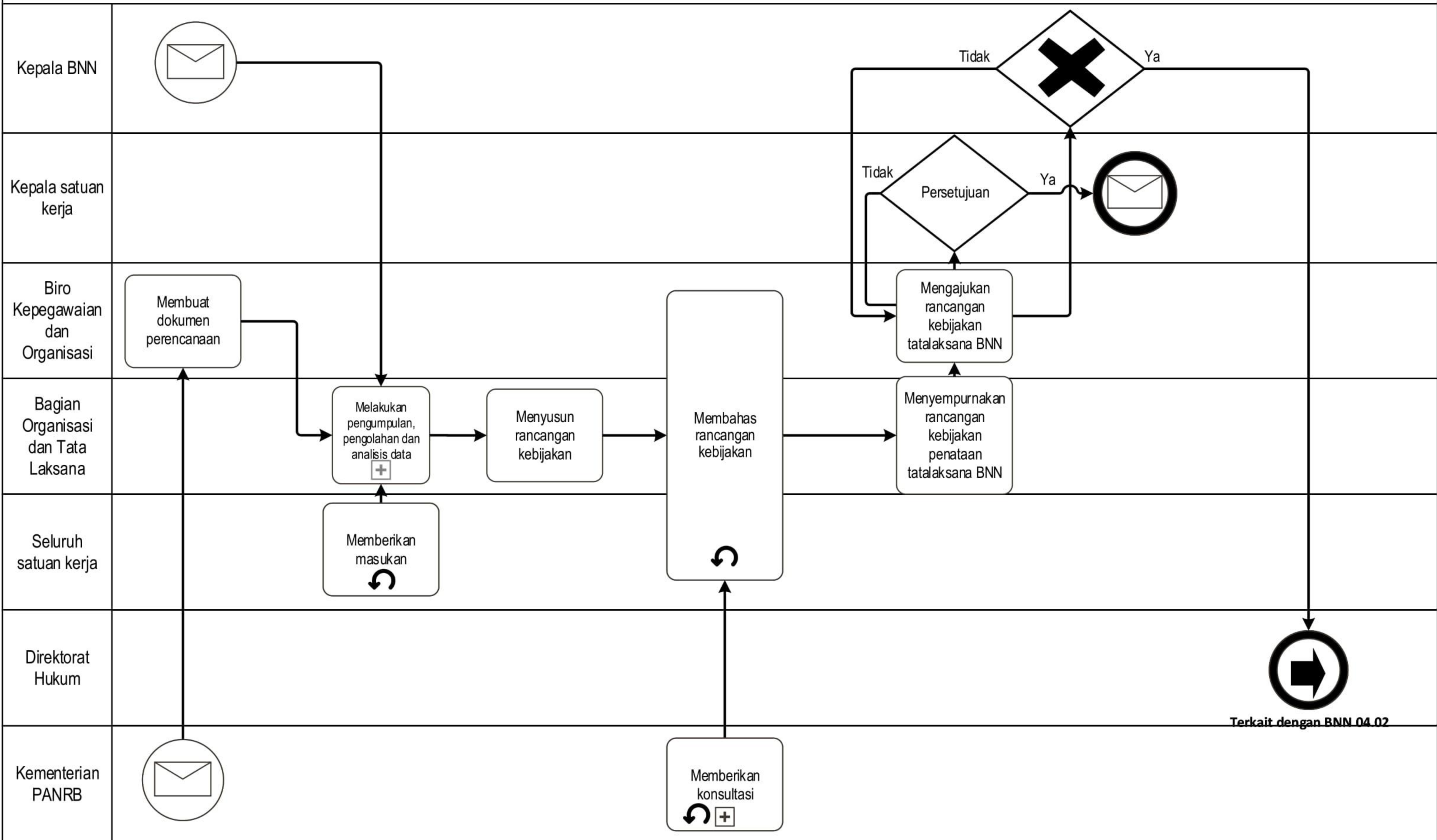
BNN 10.08 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN BNN



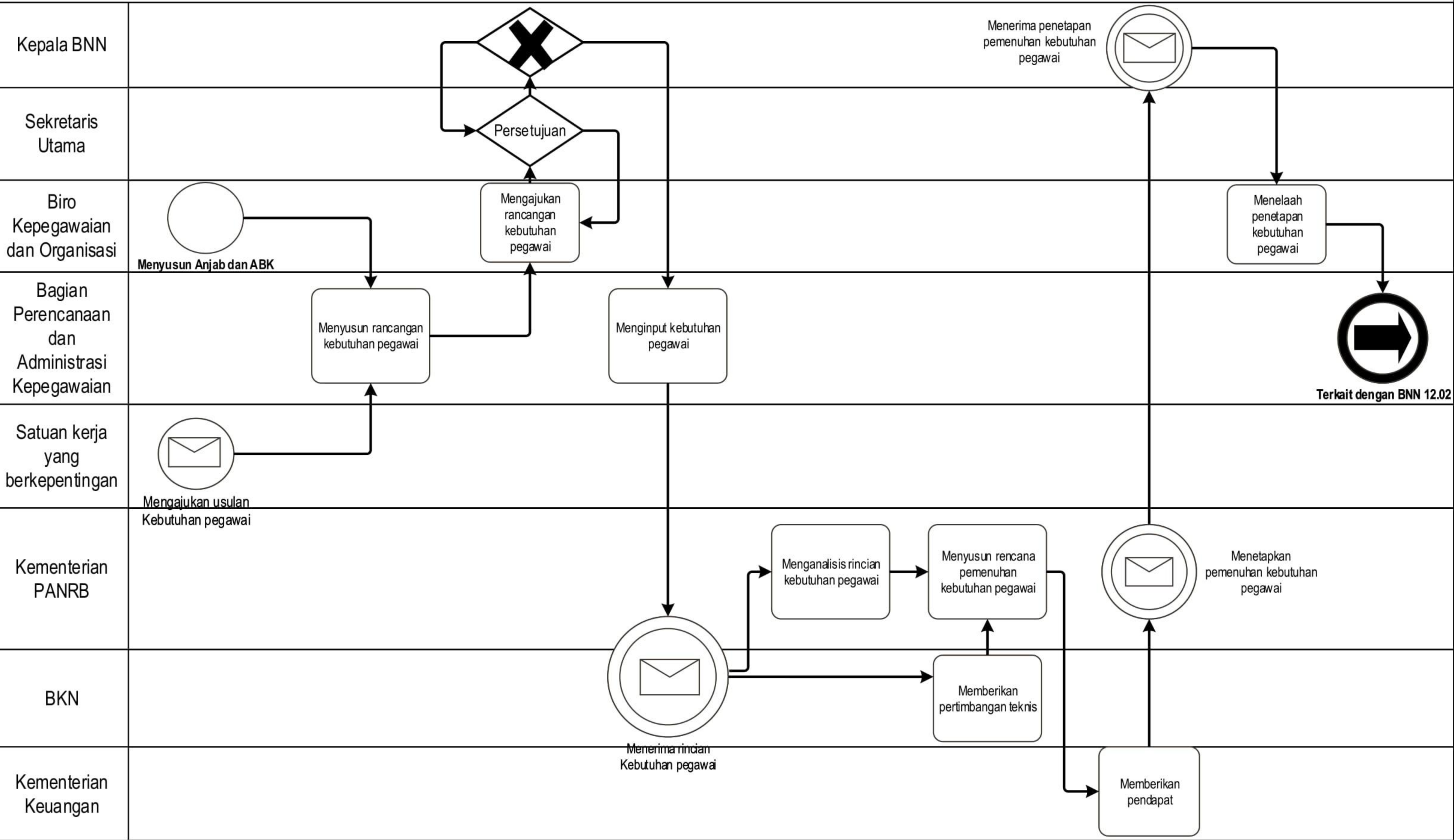
BNN 11.01 PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN



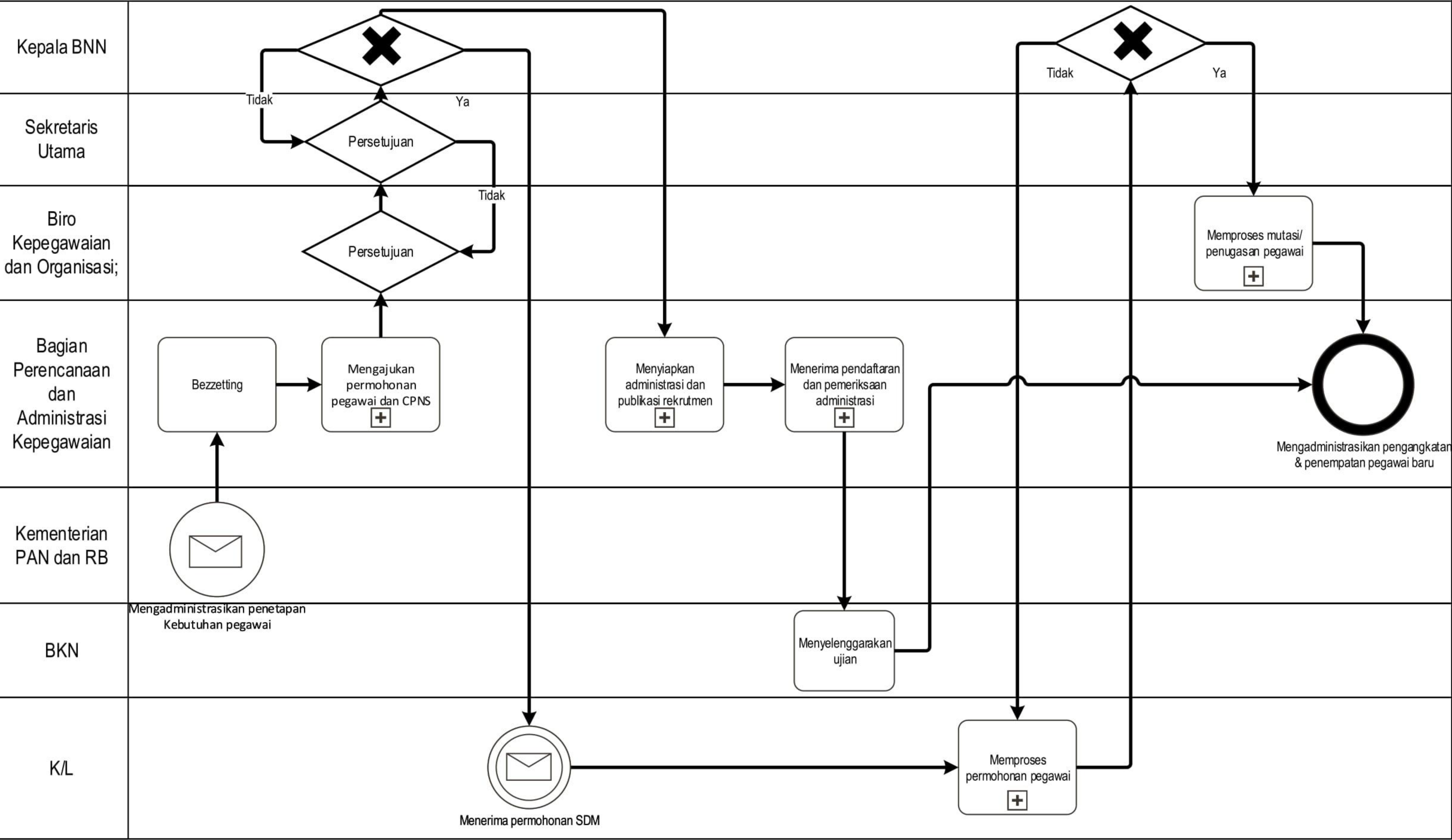
BNN 11.02 PENATAAN TATALAKSANA



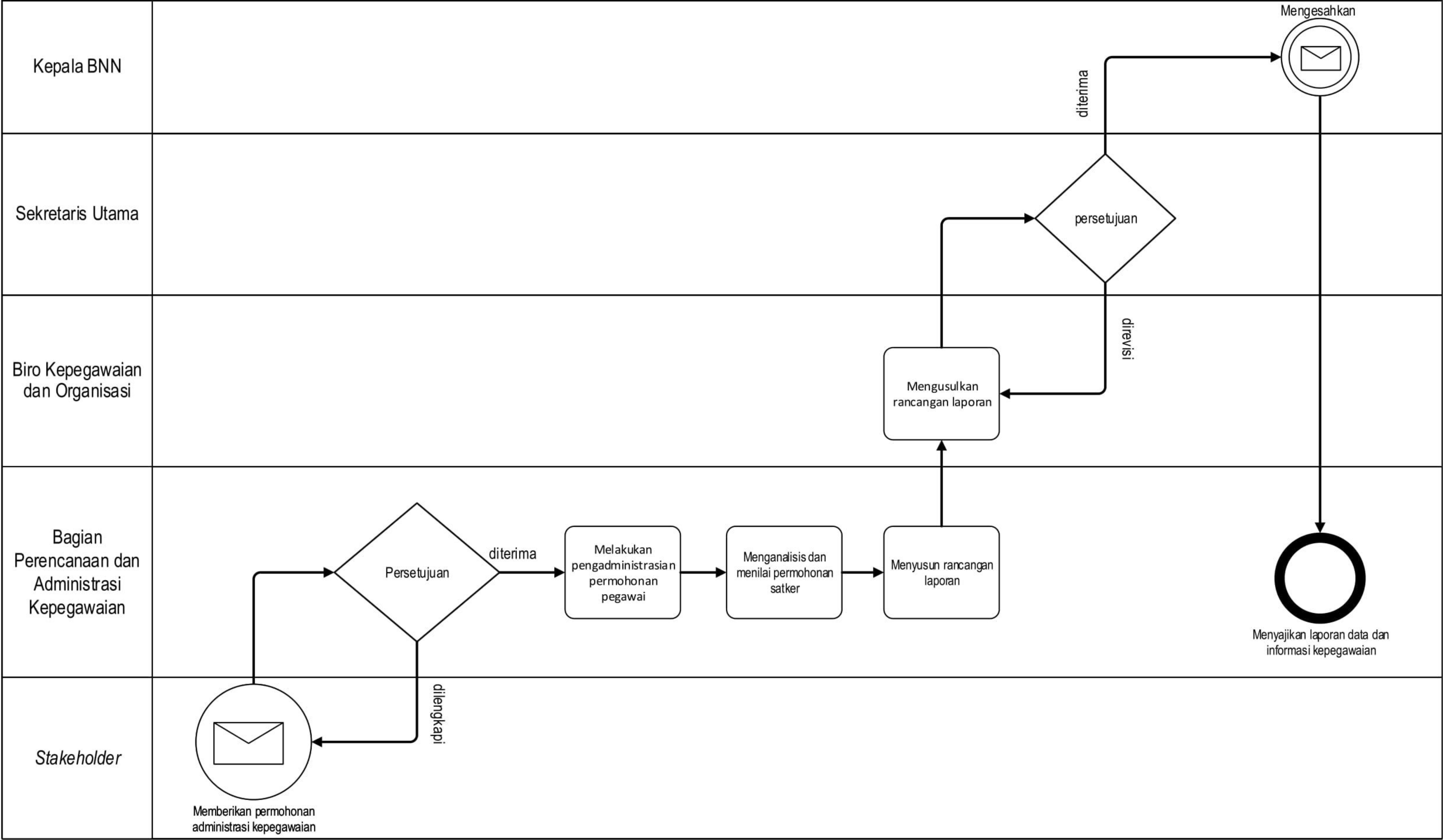
BNN 12.01 PERENCANAAN PEGAWAI



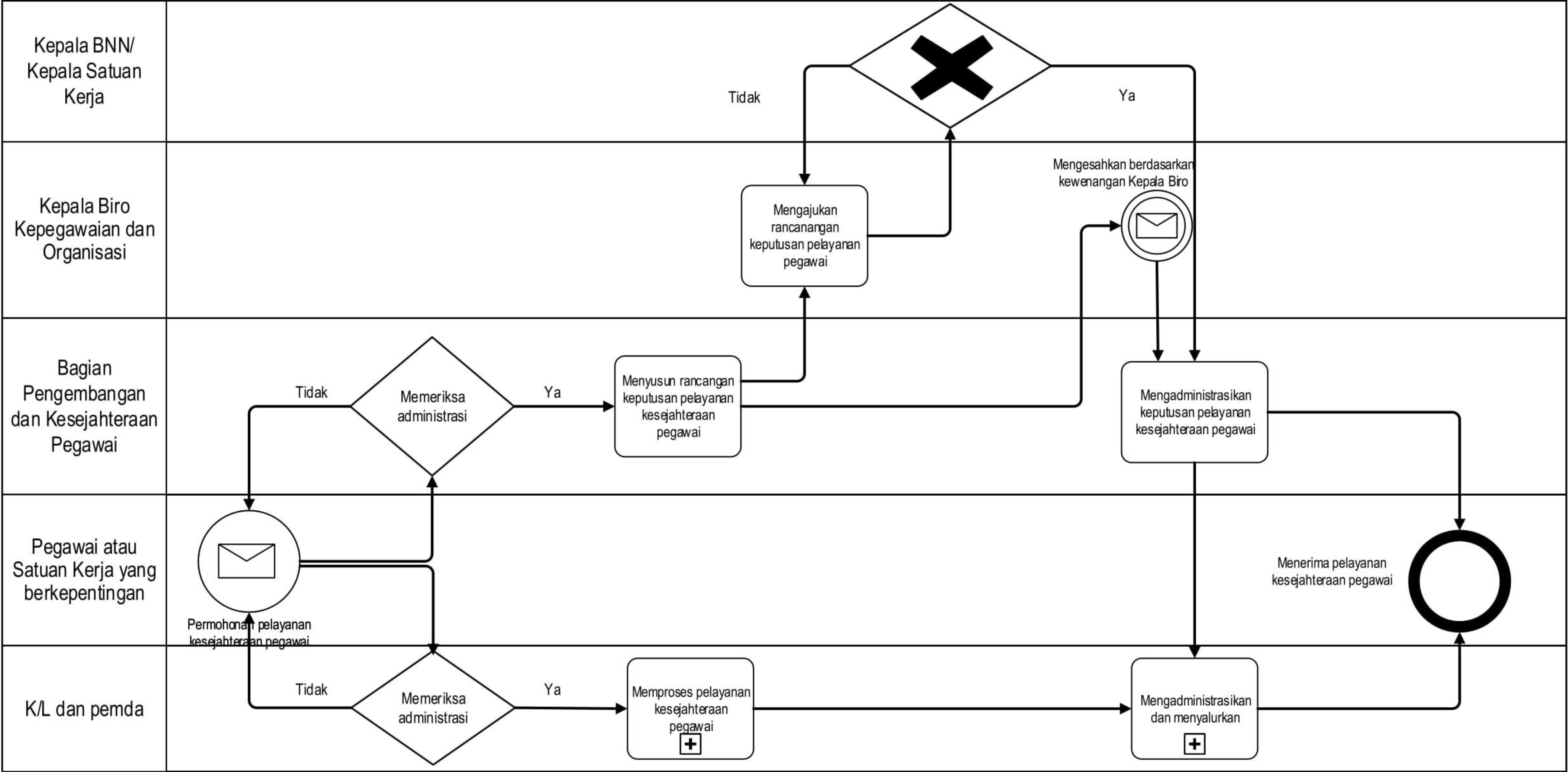
BNN 12.02 PENGADAAN PEGAWAI



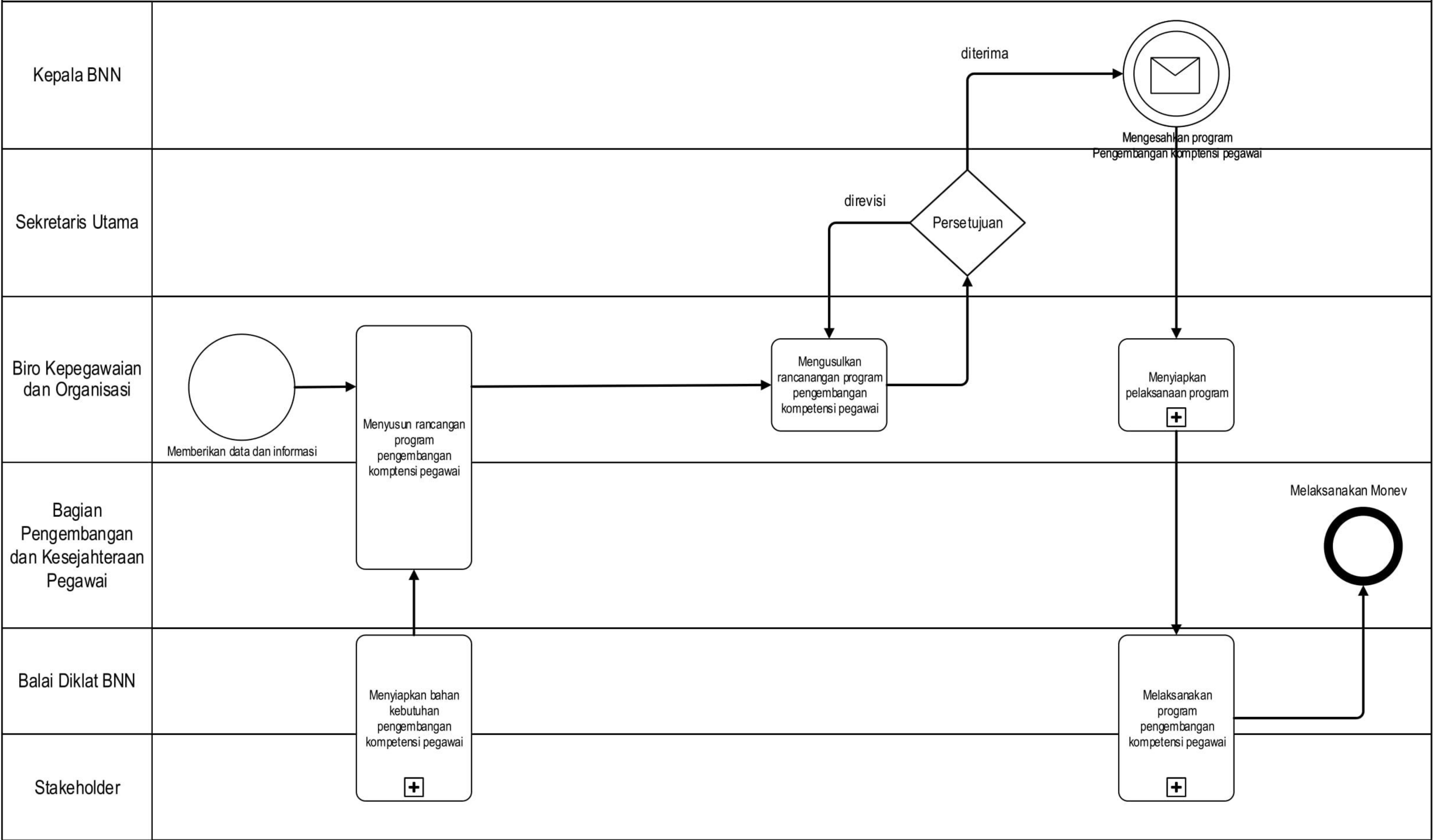
BNN 12.03 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN



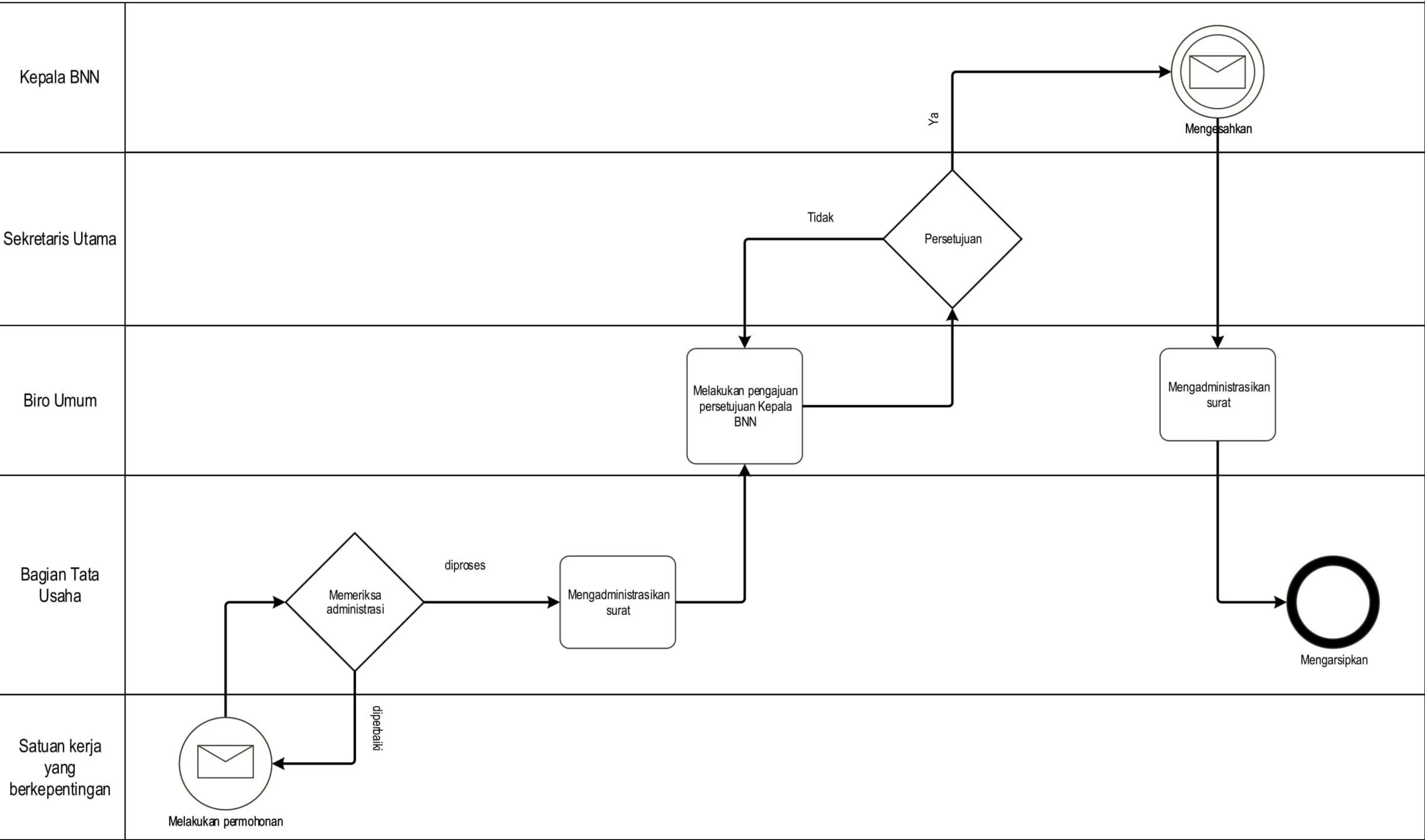
BNN 12.04 PELAYANAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN PEGAWAI



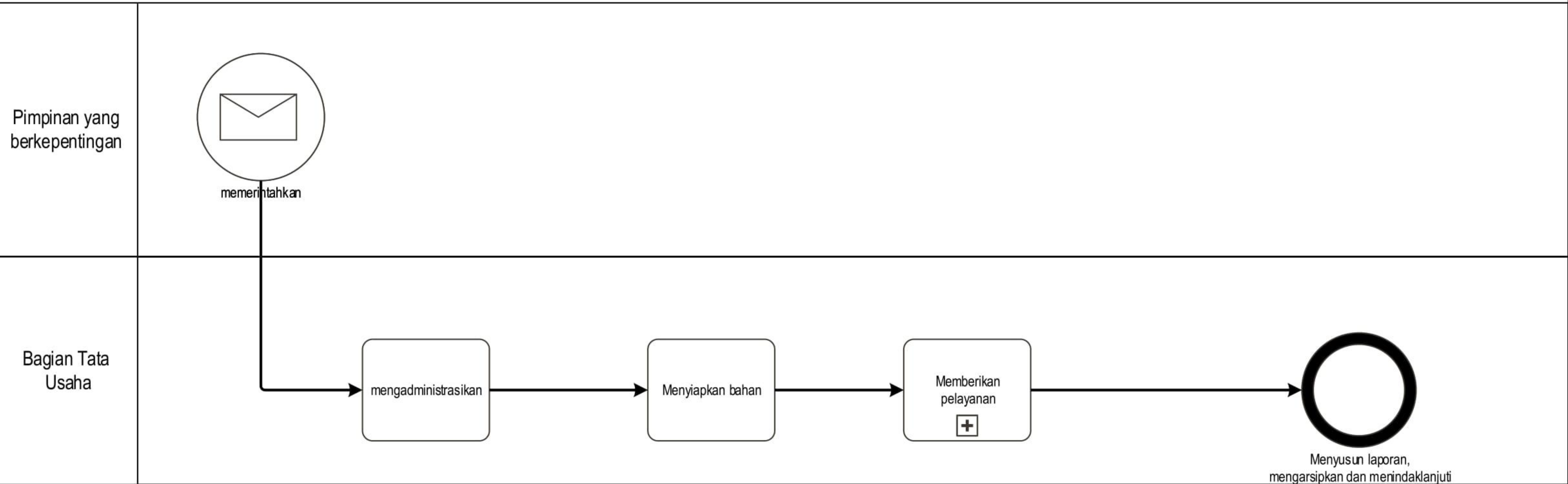
BNN 12.05 PENGEMBANGAN PEGAWAI



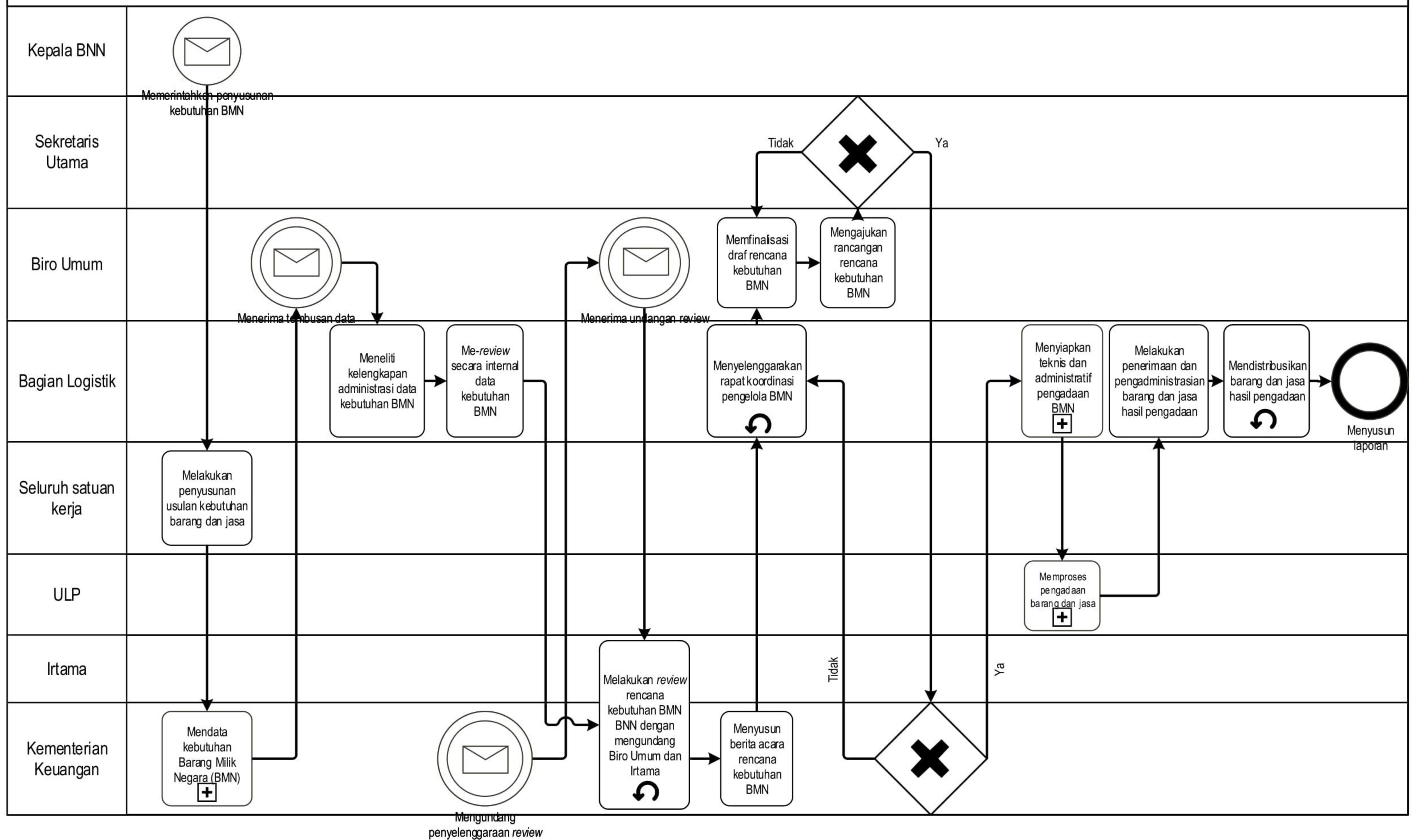
BNN 13.01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERSURATAN



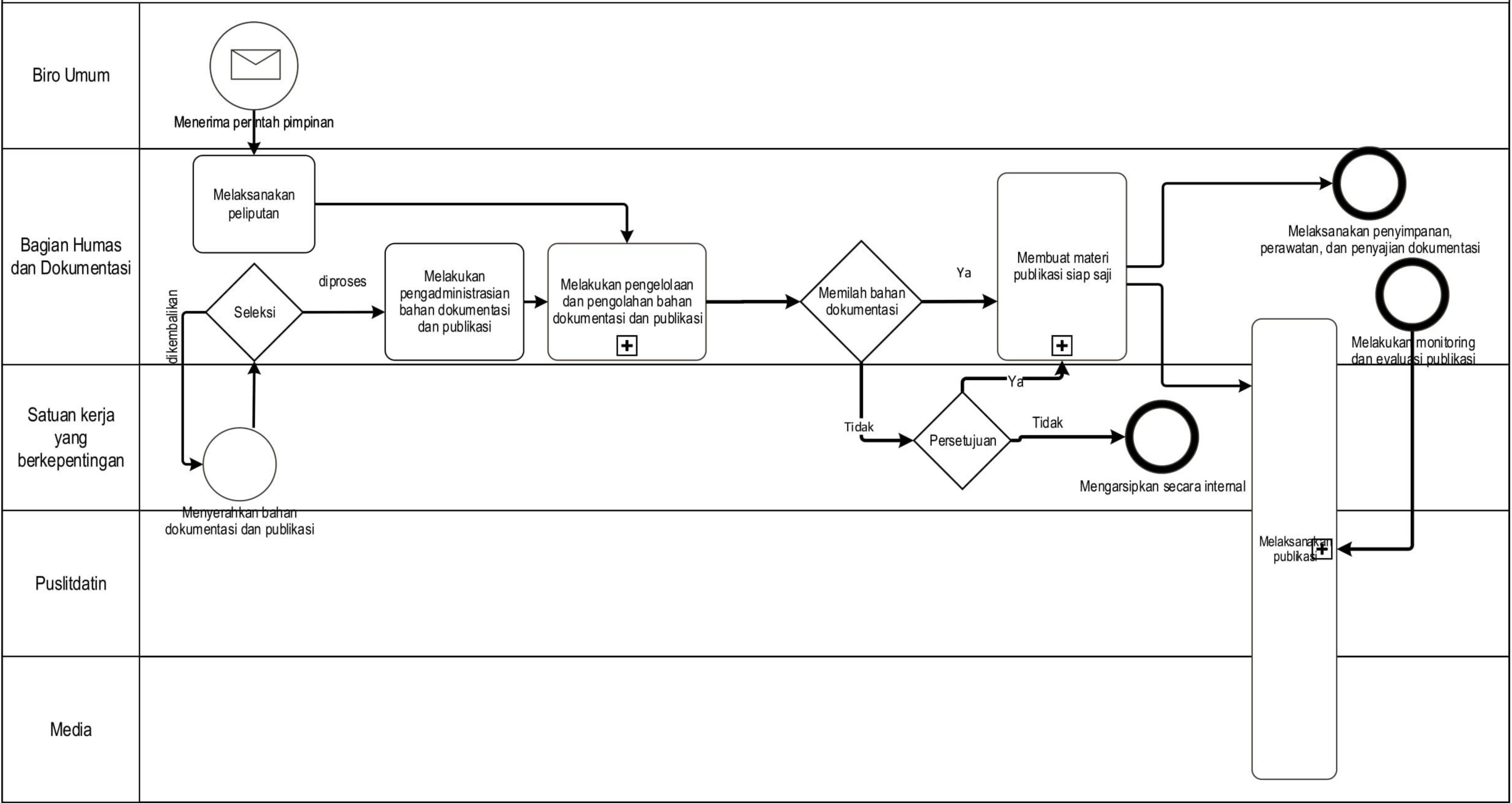
BNN 13.02 PELAYANAN KETATAUSAHAAN PIMPINAN



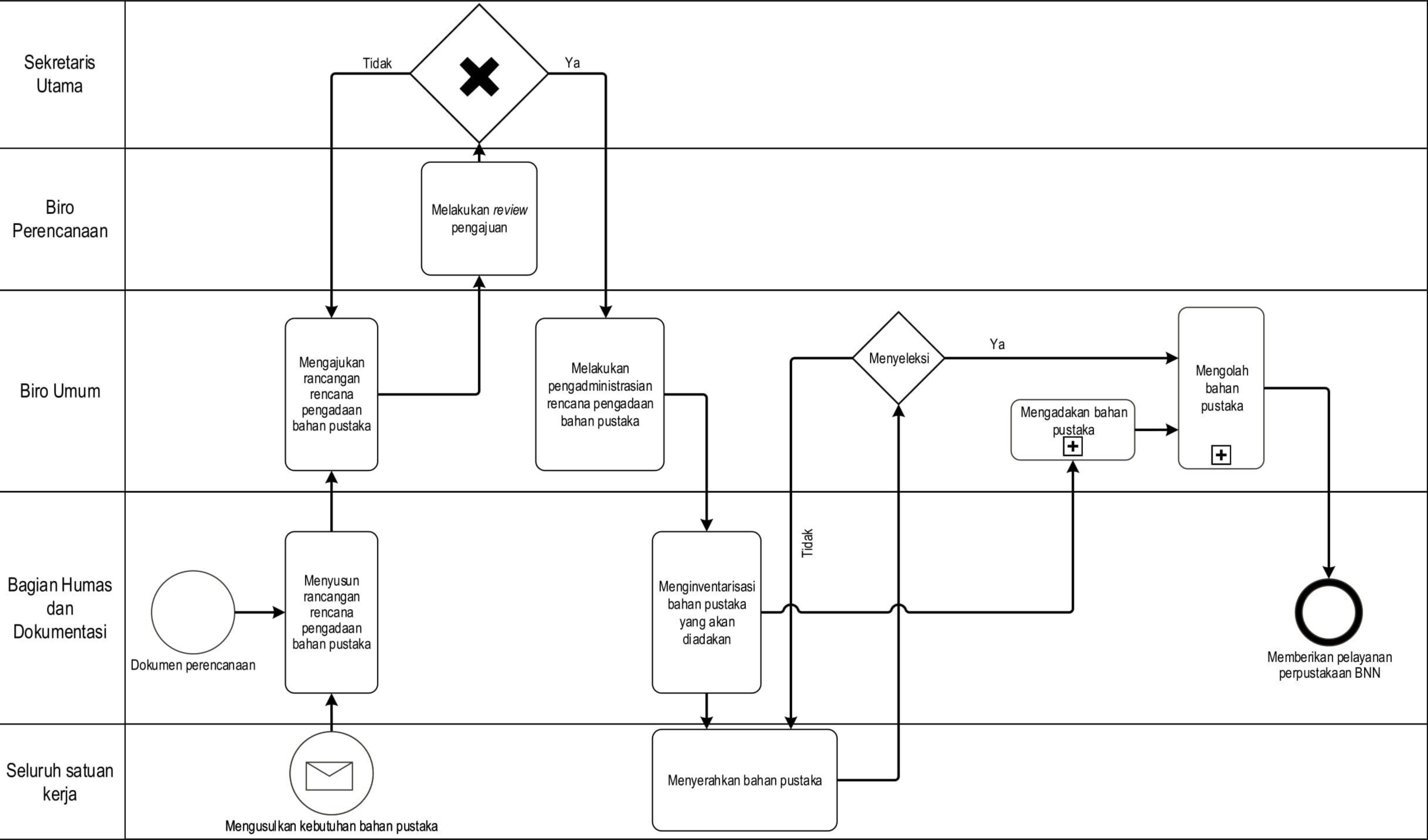
BNN 13.03 PERENCANAAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA



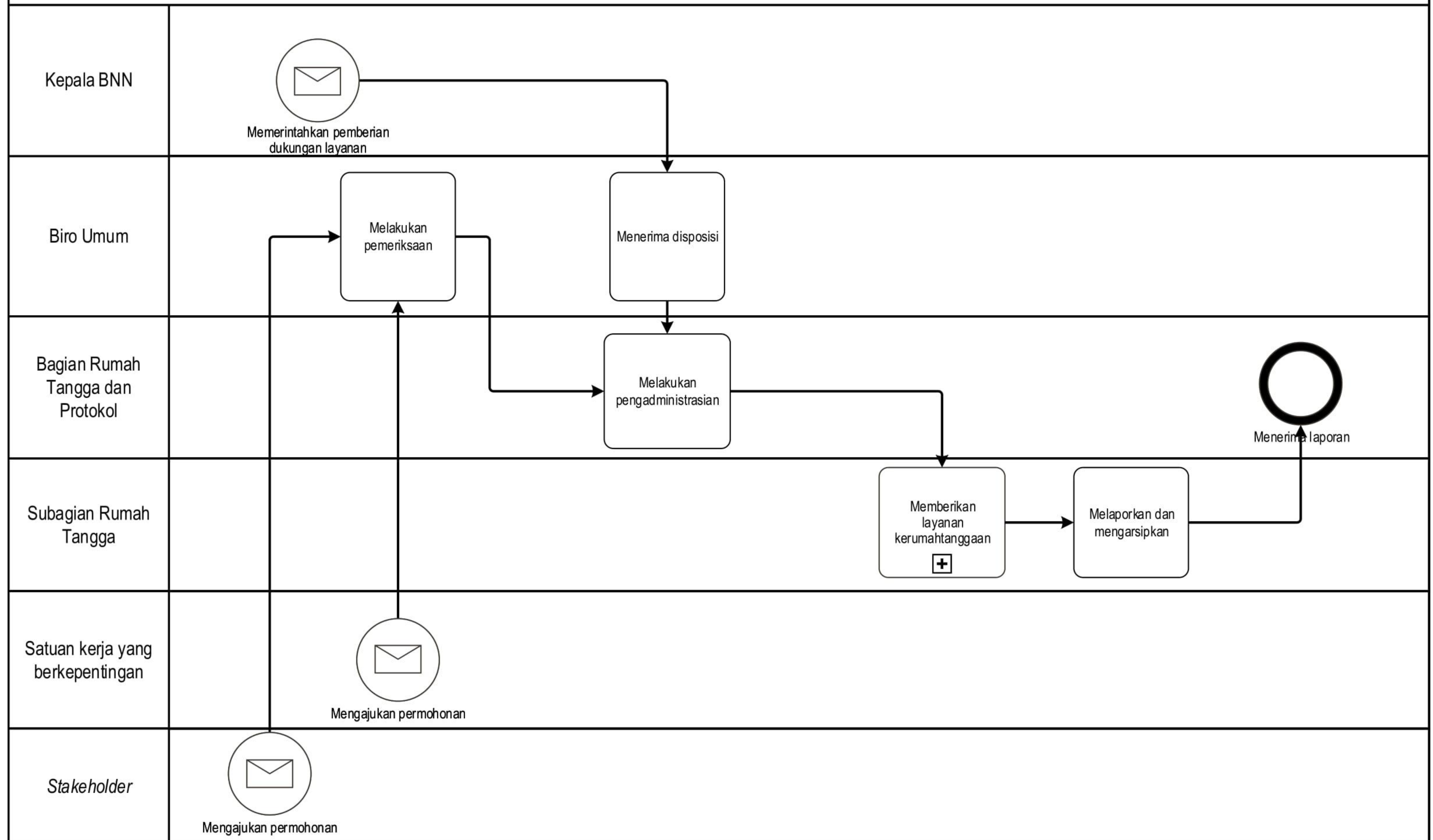
BNN 13.06 DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI BNN



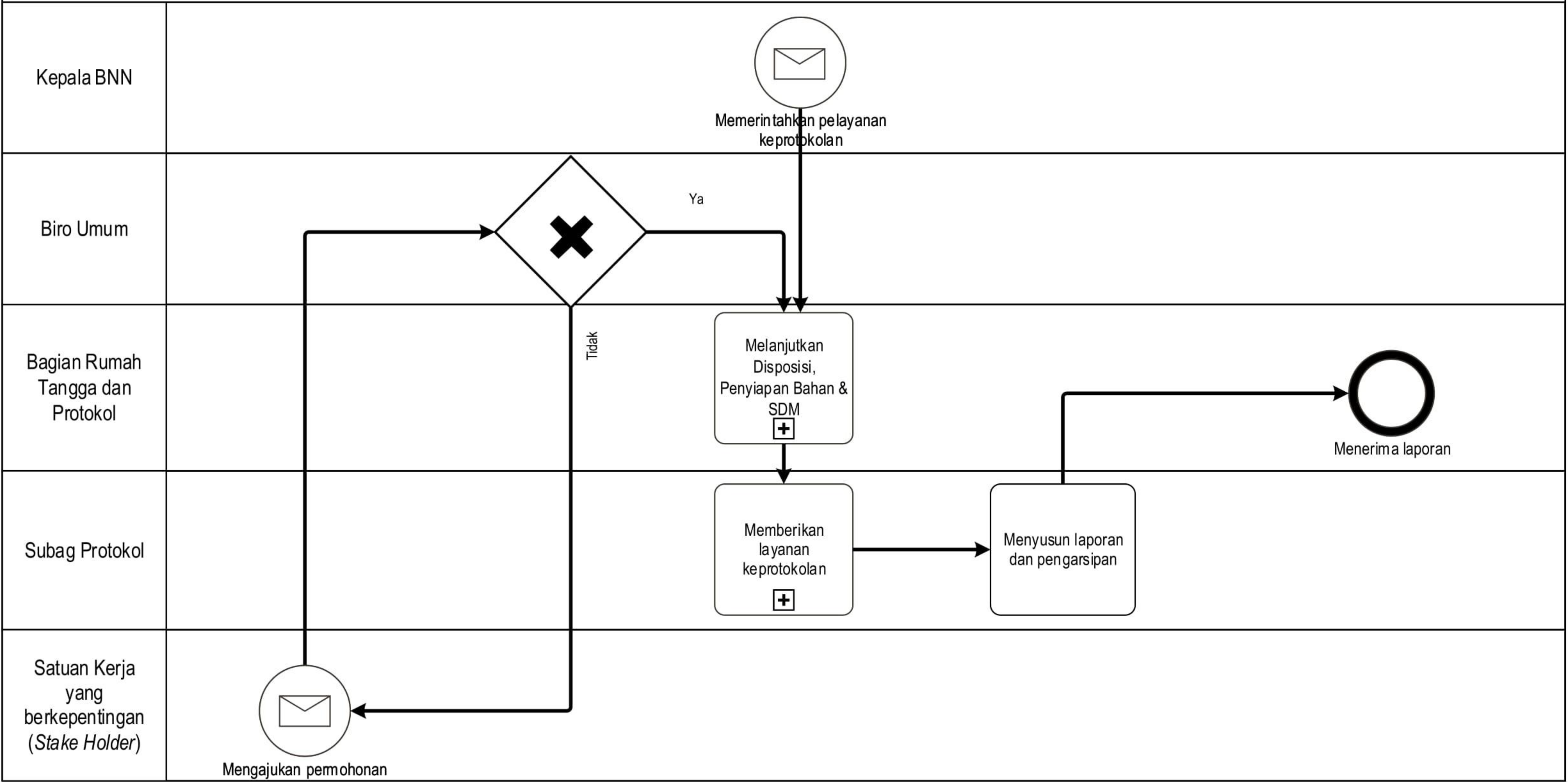
BNN 13.07 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN



BNN 13.08 PENGELOLAAN LAYANAN KERUMAHTANGGAAN



BNN 13.09 PELAYANAN PROTOKOLER



BNN 13.10 PENGELOLAAN ARSIP

